



**PEMERINTAH  
PROVINSI RIAU**

# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU  
TAHUN 2026**

Jalan Pattimura No. 6 Telp (0761) 22921 Fax. (0761) 23191

PEKANBARU - 28131

TAHUN 2025



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 November 2025

Plt. GUBERNUR RIAU,

TTD

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 39

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**YAN DHARMADI, SH, MH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003



## KATA PENGANTAR

Bersyukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat Rahmat, dan Karunia Nya penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau maka seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai Pedoman Kerja dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan demi terwujudnya pembangunan kelautan dan perikanan yang tangguh, berdaya saing dan lestari di masa yang akan datang.

Penyusunan Renja ini masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam upaya tercapainya rencana kerja yang akuntabel dan transparan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata atas nama seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian Dokumen ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau.

Pekanbaru, November 2025

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Riau



Wiwik Puji Rahayu, S.Pi, M.Si  
Pembina TK.I / IV.b  
NIP: 19700508 199703 2 004

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	41
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	48
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD .....	52
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	82
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	95
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	95
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .....	97
3.3 Program dan Kegiatan .....	99
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	129
BAB V PENUTUP .....	169

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau (Tabel T-C.29) .....	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30).....	44
Tabel 2.3	Keterkaitan Masalah dengan Isu Strategis .....	49
Tabel 2.4	Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun Periode 2026 (Tabel T-C.31) .....	52
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Tabel T-C.32) .....	84
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Perikanan Tahun 2026 .....	98
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Tabel T-C 33) .....	103
Tabel 4.1	Capaian Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2026 .....	130

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau disusun berpedoman pada Renstra Perangkat daerah dan (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Provinsi Riau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanahkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja).

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2026 melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Persiapan Penyusunan;

Meliputi (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, serta (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal;

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis

gambaran pelayanan Perangkat Daerah, dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan;

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;

Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan.

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau merupakan proses penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) berdasarkan PERKADA tentang RKPD 2026. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tahun 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 untuk menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja (Renja) kedalam program, kegiatan dan sub-kegiatan perangkat daerah, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mengacu pada RPJMD Provinsi Riau dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu (satu) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

## 1.2. Dasar Hukum

Dalam Penyusunan **Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan**, yang dijadikan dasar hukum dalam penyusunannya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.

8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 74);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3).
13. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 22).
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026;
15. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Nomor : 000.7.2/DKP-Sekr/2025/I/001.4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah untuk menjabarkan perencanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun 2026 yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub-kegiatan perangkat daerah.

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Renstra 2025-2029 melalui program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan **Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan** Provinsi Riau sebagai berikut:

##### **Bab I. Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 dan capaian untuk Tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategis berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.
  5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dengan tugas pokok dan fungsi.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD.

### **Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

### **Bab V. Penutup**

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif atas permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi perangkat daerah. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi PD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Pada Tahun 2024 memiliki program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 6 (enam) Kegiatan;
2. Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan 2 (Dua) Kegiatan;
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan 4 (Empat) Kegiatan;
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan 4 (empat) Kegiatan;
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan 2 (dua) Kegiatan;
6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan 2 ( dua) kegiatan;

Secara rinci Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel Tabel 1 berikut:

Tabel 2.1.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah  
s/d Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Tabel T-C.29)

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja ujuan,Sasaran,Program, (Outcome) dan Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Yang Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
		(Out put)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
SEKRETARIAT												
3	25 00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	0	100	100	100	0	100	1
3	25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi								
3	25 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	143	143	143	100	143	429	1.5
3	25 1 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola								
3	25 1 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	100	7	7	100	14	121	0.605
3	25 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi								
3	25 1 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	46	62	62	100	5	113	0.86
3	25 1 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	10,428	10,428	100	5	10,438	521.9

3	25	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	15	15	15	100	37	67	1.20
3	25	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	155	1	1	100	260	416	0.73
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>									
3	25	1	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	4	4	4	100	4	12	0.23
3	25	1	1.08	0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	44	41	41	100	44	129	0.91
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>1.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>									
3	25	1	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Jenis	14	15	15	100	14	43	1.79
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>									
3	25	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Jenis	27	27	27	100	27	81	1.05
3	25	1	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	278	278	278	100	278	834	
3	25	1	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	1	1	1	100	1	3	0.33
					<b>BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN</b>										
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Kelola (Ha)</b>		<b>Ha</b>	<b>18.542</b>	<b>141507.85</b>	<b>147128.70</b>	<b>103.97</b>	<b>280,624.00</b>	<b>223.426</b>	<b>10,016</b>
3	25	2	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola (Ha)									

3	25	2	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		Ha	18.539	144,633.74	144,633.74	100	144,633.73	#####	144643.00
3	25	2	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi		Ha	3	2	2	100	6	11	1.57
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>1.02</b>		<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Jumlah Izin yang Diterbitkan</b>									
3	25	2	1.02	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0
3	25	2	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan		Rekomendasi	0	9	9	100.00	9	18	1.125
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>1.03</b>		<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan</b>									
3	25	2	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		Orang	0	0	0	0	90	90	0.64
3	25	2	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Kelompok	0	0	0	0	9	9	0.64
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Persentase Pelanggaran yang ditangani (%)</b>		<b>16</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>112,5</b>

3	25	5	1.02		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan											
3	25	5	1.02	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	0	20	5	25	200	205	0.68			
3	25	5	1.02	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	20	30	23	76.67	20	63	0.21			
3	25	5	1.02	0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	0	20	3	15	10	13	0.04			
3	25	5	1.01		<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>												
3	25	5	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas(POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok	2	2	2	100	10	14	7			
					<b>BIDANG TANGKAP</b>												
3	25	3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)</b>		<b>157.199,87</b>	<b>135.773,42</b>	<b>157,199.87</b>	<b>125.775,56</b>	<b>80.01</b>	<b>157.199,87</b>	<b>292.173</b>	<b>18,586</b>		

3	25	3	1.01		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan</b>											
3	25	3	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	1	1	100	1	3	1.5			
3	25	3	1.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	2283	1,545	1,545	100	1520	5348	1.95			
3	25	3	1.02		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan</b>											
3	25	3	1.02	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit	0	0	0	0	0	0	0			
3	25	3	1.02	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit	364	40	262	655	45	671	6.85			
3	25	3	1.03		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>Jumlah perizinan berusaha perikanan tangkap yang diterbitkan untuk kapal perikanan</b>											
3	25	3	1.03	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	100	101	101			
3	25	3	1.03	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi	150	170	244	143.53	170	564	2.56			
					<b>BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA</b>												
3	25	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(ton)</b>		<b>131.379,52</b>	<b>124.733,54</b>	<b>131,379.52</b>	<b>127.470,63</b>	<b>97.02</b>	<b>131.379,52</b>	<b>252.865</b>	<b>19,247</b>		

3	25	4	1.02		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>	<b>Jumlah perizinan berusaha perikanan budidaya di Laut sampai Dengan 12 Mil yang</b>											
3	25	4	1.02	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25	4	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		Rekomendasi	0	10	40	400	10	50	5		
3	25	4	1.04		<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah</b>											
3	25	4	1.04	0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Rekomendasi	0	80	79	98.75	100	179	0.895		
3	25	4	1.05		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan</b>											
3	25	4	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Unit	0	0	0	0	5	5	0.5		
3	25	4	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Unit	12	17	1	5.88	17	30	0.91		
3	25	4	1.05	0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat		Dokumen	1	1	1	100	10	12	0.39		

3	25	4	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	115	90	90	100	90	295	1.05	
					<b>Bidang P2HKP</b>										
3	25	6			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Jumlah Produksi hasil Olahan Perikanan (Ton)</b>		<b>19.738,45</b>	<b>25.725,26</b>	<b>19,738.45</b>	<b>15,514,06</b>	<b>78.60</b>	<b>19.738,45</b>	<b>52364</b>	<b>26,529</b>
3	25	6	1.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil yang diterbitkan</b>									
3	25	6	1.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi		1	1	0	0	0	6	7	7
3	25	6	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		12	0	0	0	0	7	7	0.58
3	25	6	1.02		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan</b>									
3	25	6	1.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		12	0	3	3	100	1	4	1

3	25	6	1.03		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Hasil Perikanan Yang Tersedia</b>										
3	25	6	1.03	0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		2	1	1	1	100	1	3	1.5	
					<b>UPT.PSDKP WIL 1</b>											
3	25	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10000</b>	
3	25	1	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi</b>										
3	25	1	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Stel	0	0	0		0	0	0	
3	25	1	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi</b>										
3	25	1	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	9	9	9	100	9	27	3.375	
3	25	1	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	16	1	1	100	16	33	3.3	
3	25	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	5	11	11	100	11	27	2.7	
3	25	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	24	1	1	100	31	56	1.44	
3	25	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>										
3	25	1	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	4	6	6	100	7	17	4.25	
3	25	1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</b>										

3	25	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	3	3	100	2	7	0.875
3	25	1	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	1	1	0.5
3	25	1	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	18	18	100	13	47	2.94
3	25	5			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>*Persentase Pelanggaran yang ditangani (%)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>112,5</b>
3	25	5	1.01		<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi</b>								
3	25	5	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	55	60	41	68.33	30	126	2.17
3	25	5	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	9	9	7	77.78	5	21	0.35
					<b>UP.PSDKP WIL 2</b>		458							0
3	25	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	%	100	100	100	100	100	200	100
3	25	1	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi</b>								
3	25	1	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	0
3	25	1	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)</b>								
3	25	1	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	9	9	100	6	21	0.81
3	25	1	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	288	276	95.83	5	286	28.6
3	25	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3	3	100	2	7	1.4

3	25	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	100	12	36	1.64
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
3	25	1	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	4	4	100	5	14	1.4
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</b>								
3	25	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	2	100	2	6	1.2
3	25	1	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	13	12	92.31	3	15	1.15
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Persentase Pelanggaran yang ditangani (%)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	100	<b>16</b>	19	112,5
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>1.01</b>		<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi</b>								
3	25	5	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	161	15	5	5	100	180	200	3.57
3	25	5	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	60	3	4	4	100	10	17	0.28
					<b>UPT.PSDKP WIL 3</b>									
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>1.02</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	200	1
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>1.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi</b>								
3	25	1	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	0

3	25	1	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi</b>										
3	25	1	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	5	5	100	6	17	0.52		
3	25	1	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	4	4	100	5	14	2.8		
3	25	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	4	4	100	5	14	1.4		
3	25	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	8	8	100	10	30	1.5		
3	25	1	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>										
3	25	1	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	7	7	100	8	23	1.44		
3	25	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>										
3	25	1	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	7	7	100	8	22	2.00		
3	25	1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</b>										
3	25	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	2	2	100	1	6	1.5		
3	25	1	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	4	4	100	9	13	1.44		
3	25	5			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>*Persentase Pelanggaran yang ditangani (%)</b>	16	0	16	16	100	16	36	112,5		
3	25	5	1.01		<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi</b>										

3	25	5	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		Dokumen	51	75	69	92	75	195	3.36
3	25	5	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		Dokumen	0	30	8	26.67	8	16	0.27
					<b>UPT.Budidaya Perikanan</b>										
3	25	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100%	0	100	100	100	100	101	100
3	25	1	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi</b>									
3	25	1	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Stel	0	0	0	0	0	0	0
3	25	1	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi</b>									
3	25	1	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	6	8	8	100	6	20	1.67
3	25	1	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	5	3	3	100	6	14	1.4
3	25	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	4	4	4	100	6	14	1.75
3	25	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	21	1	1	100	28	50	0.98
3	25	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>									
3	25	1	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	18	25	25	100	18	61	1.69
3	25	1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</b>									
3	25	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit	5	2	2	100	3	10	1

3	25	1	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	0	0	0	0	15	15	3.75
3	25	1	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	3	1	1	100	37	41	0.55
3	25	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)</b>		509.001,54	124.733,54	131,379.52	122,427.60	93.19	131.379,52	252865	24,82
3	25	4	1.05		<b>Kegiatan: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan</b>									
3	25	4	1.05	0003	Penyediaan PraSarana Pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota			Unit	0	0	0	0	3	3	0.5
3	25	4	1.05	0005	Penyediaan Sarana Pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota			Unit	0	0	0	0	3	3	0.5
3	25	4	1.06		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>	<b>Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan</b>									
3	25	4	1.06	0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Unit	3	2	2	100	2	7	0.875

3	25	4	1.06	0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jenis	7	10	10	100	8	25	1.47
					<b>UPT.PMHP</b>										
3	25	1	1.02		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100	0	100	0	100	100	101	100
3	25	1	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)</b>									
3	25	1	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	7	5	5	100	5	17	2.83
3	25	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	4	4	4	100	4	12	3
3	25	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	6	1	1	100	4	11	0.92
3	25	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>									
3	25	1	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	10	10	10	100	10	30	1.5
3	25	1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</b>									
3	25	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		unit	3	3	3	100	3	9	3
3	25	1	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	0	9	9	100	9	18	1

3	25	6			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Jumlah Produksi hasil Olahan Perikanan (Ton)</b>		68.825,06	25.725,26	19,738.45	15,509.68	78.58	19.738,45	36051,2	26,07
3	25	6	1.02		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan</b>									
3	25	6	102	0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing		36	1	4	1	25.00	10	12	0.55
					<b>UPT.PELABUHAN PERIKANAN</b>										
3	25	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100%	0	100	100	100	100%	2	100
3	25	1	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)</b>									
3	25	1	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	1	9	9	100	6	16	1.6
3	25	1	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	2	1	1	100	6	9	0.50
3	25	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	3	2	2	100	1	6	0.6
3	25	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	29	1	1	100	1	31	0.65
3	25	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>									
3	25	1	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	11	1	1	100	1	13	0.59

3	25	1	1.08	0002	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	0	1	1	100	20	21	0.7	
3	25	1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</b>										
3	25	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit	2	2	2	100	3	7	1.17	
3	25	1	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	0	0	0	0	14	14	1	
3	25	3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>			<b>603.226,75</b>	<b>135.773,42</b>	<b>157199.87</b>	<b>123447.55</b>	<b>78.53</b>	<b>157.199,87</b>	<b>304377</b>	<b>25,22</b>
3	25	3	1.06		<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola										
3	25	3	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		Unit	3	5	5	100	1	9	3	
3	25	3	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		Layanan	1	0	0	0	1	2	2	

### 2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan secara umum telah berjalan dengan baik, akan tetapi karena beberapa hal, permasalahan, maupun regulasi yang ada, maka tidak semua target tercapai. Terdapat tiga program yang belum mencapai target dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

#### 1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pada Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil memiliki target 141.507,85 Ha dan Realisasi 147.128.7 Ha dengan Tingkat Capaian 103,97 %. Akan tetapi ada beberapa Sub Kegiatan yang belum tercapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:

#### **Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**

- **Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**

Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi belum tercapai dikarenakan Izin belum dapat dikeluarkan karena PERDA RTRW yang terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum disahkan

#### **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

- **Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**  
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2024.
- **Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**

Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2024.

#### 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap memiliki target 157.199,87 dan Realisasi 125.775,56 Ton dengan Tingkat Capaian 80,01 %.

#### **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

- **Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap**

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada pada tahun 2024.

**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**

- **Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT**

Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada pada tahun 2024.

**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**

- **Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan**

Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada pada tahun 2024.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya memiliki target 131.379,52 dan Realisasi 127.470,63 dengan Tingkat Capaian 97,02 %

**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**

- **Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan**

Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada pada tahun 2024.

**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**

- **Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut**

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada pada tahun 2024.

- **Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut**

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut tingkat capaian realisasi 5,88% % dikarenakan Rasionalisasi dan Efisiensi Anggaran

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan memiliki target 19.738,45 dan Realisasi 15.514,06 dengan Tingkat Capaian 78,60 %.

**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

- **Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan Belum ada Unit Pengolahan Ikan (UPI) Menengah dan besar yang memiliki sertifikat menengah besar.

**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

- **Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan belum adanya Unit Pengolahan Ikan (UPI) menengah dan besar yang mengusulkan sertifikat standart sesuai kewenangan.

5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

- **Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya.**

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya tingkat capaian realisasi 25 % dikarenakan adanya Rasionalisasi dan Efisiensi Anggaran.

- **Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya**

Sub Kegiatan - Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan

Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya tingkat capaian realisasi 76,7 % dikarenakan adanya Rasionalisasi dan Efisiensi Anggaran.

- **Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi tingkat capaian realisasi 15 % dikarenakan adanya Rasionalisasi Anggaran.

**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**

- **Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil.**

**UPT Wilayah I :**

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil pada UPT Wilayah I tingkat capaian realisasi 68,3% dikarenakan rasionalisasi dan efisiensi anggaran.

- **Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil**

**UPT Wilayah I :**

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil tingkat capaian realisasi 77,78 % dikarenakan rasionalisasi dan efisiensi anggaran.

**UPT Wilayah III :**

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil tingkat capaian realisasi 26,67 % dikarenakan rasionalisasi dan efisiensi anggaran.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di UPT

**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2024.

**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2023.

**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2024.

- **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada tahun 2024.

### **2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan.**

Hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024 secara umum telah berjalan dengan baik, dimana semua capaian output kegiatan/sub kegiatan telah memenuhi target yang ditetapkan, dan terdapat tiga program yang telah memenuhi target kinerja. Capaian program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target adalah :

#### **1. SEKRETARIAT dan UPT Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Sekretariat dan UPT Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Ketercapaian hampir semua sub kegiatan mencapai 100%, dengan Sub Kegiatan :

- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
- **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**
- **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**
- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
- **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
- **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**
- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**
- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
- **Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

#### **2. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**

- **Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat**  
Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%
- **Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**  
Sub Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**

- **Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**  
Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**

- **Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas(POKMASWAS)**  
Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas(POKMASWAS) dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

**3. BIDANG PERIKANAN TANGKAP**

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**

- **Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan**  
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%
- **Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap**  
Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

#### **4. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA**

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

- **Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**

- **Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

- **Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar 100%

#### **5. BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN PERIKANAN**

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**

- **Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**

Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

- **Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

**6. UPT. PSDKP WILAYAH II**

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**

- **Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil**

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

- **Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil**

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

**7. UPT. PSDKP WILAYAH III**

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

**Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**

- **Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil**  
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

## **8. UPT. BUDIDAYA**

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

### **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**

- **Penyediaan PraSarana Pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota**

Sub Kegiatan Penyediaan PraSarana Pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

- **Penyediaan Sarana Pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota**

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

## **9. UPT PELABUHAN**

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%, seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

### **Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**

- **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan**

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

### 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2024 terdapat dua program yang melebihi target kinerja. Capaian program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target adalah :

#### 1. BIDANG TANGKAP

Proram Pengelolaan Perikanan Tangkap

##### **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**

###### - **Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap**

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan tingkat capaian kinerja output 230,74% dikarenakan adanya penambahan bantuan untuk masyarakat setelah penetapan RKPD sesuai usulan dari masyarakat.

##### **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

###### - **Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap**

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan tingkat capaian kinerja output 655% dikarenakan adanya penambahan bantuan untuk masyarakat setelah penetapan RKPD sesuai usulan dari masyarakat.

##### **Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**

###### - **Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT**

Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT dengan tingkat capaian kinerja output 143,53% dikarenakan kepatuhan nelayan untuk mengikuti regulasi yaitu membuat izin persiapan Penangkapan Ikan Terukur.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja yang diukur dalam pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan terdiri dari 3 sasaran strategis, dengan 8 indikator sasaran dari 11 program sebagaimana yang dievaluasi dari Renja Perangkat Daerah. Secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut:

### 1. Meningkatnya Produksi Perikanan

Sasaran Strategis dalam mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, mengacu pada Indikator Kinerja yaitu meningkatnya Produksi Perikanan dalam hal ini Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, serta Poduksi hasil pengolahan perikanan.

2. Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan untuk mewujudkan Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mewujudkan Sasaran strategis ini dengan indicator kinerja yaitu Persentase pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Tabel T-C.30)**

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasai Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n-+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n-+1)	
NTN			113.00	105.34	105.95	105.97	104.44	103.88	113.00	113.00	
NTPi			113.00	101.56	102.98	103.00	100.35	100.27	113.00	113.00	
Produksi Perikanan (Ton)			288,589.39	255,915.02	256,855.60	257,799.38	253,246.20	260,843.59	268,668.89	276,728.96	
Produksi perikanan Budidaya (Ton)	-	Jumlah produksi perikanan Budidaya (Ton)	131,389.52	128,115.02	128,755.60	129,399.38	127,470.63	131,294.75	135,233.59	139,290.60	
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	-	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	157,199.87	127,800.00	128,100.00	128,400.00	125,775.57	129,548.84	133,435.30	137,438.36	
Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	-	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	19,738.45	16,802.33	17,306.21	17,825.40	15,514.06	16,802.33	17,306.21	17,825.40	
Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)	-	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)	59.05	69.50	70.00	70.01	59.05	69.50	70.00	70.01	
Persentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	-	Persentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	11.66	11.70	11.70	14.70	11.66	11.70	11.70	14.70	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	-	Nilai SAKIP	68,20	70	72	74	68,20	69,00	72	74	

Berdasarkan Tabel 2 (T-C 30) Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yaitu:

### **1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)**

NTN adalah salah satu alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Bisa dikatakan salah satu faktor yang menentukan yang menentukan tingkat penerimaan nelayan adalah jumlah tangkapan ikan oleh nelayan.

NTN Tahun 2024 memiliki target 113 % dan realisasi 104,44 %, sehingga capaiannya adalah 92,42 % dari target dengan menggambarkan bahwa nelayan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik pada tahun 2024.

### **2. Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)**

NTPi adalah salah satu alat ukur kesejahteraan nilai tukar pembudidaya ikan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh pembudidaya dengan harga yang dibayarkan oleh pembudidaya. Bisa dikatakan salah satu faktor yang menentukan yang menentukan tingkat penerimaan pembudidaya ikan adalah jumlah hasil yang diterima oleh pembudidaya. Nilai NTPi tahun 2024 memiliki target 113 % dan realisasi 100,35 %, sehingga capaiannya adalah 88,81 % dari target menggambarkan bahwa pembudidaya memiliki tingkat kesejahteraan yang baik pada tahun 2024.

### **3. Meningkatnya Produksi Perikanan**

Meningkatnya Produksi Perikanan, untuk jumlah produksi Kelautan dan Perikanan ini merupakan akumulasi dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap, dimana capaian jumlah produksi Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebesar 253.246,20 ton atau 87,75% % dari target sebesar 288.589,39 Ton.

#### **- Produksi Perikanan Budidaya**

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 sebesar 127.470,63 ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 yakni sebesar 124.733,54 ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 97,02 persen. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya mengalami kenaikan pada tahun 2024. Adapun usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya adalah diadakannya program pakan mandiri.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Budidaya :

1. Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan sehingga menjadi kelompok yang mandiri.
2. Pemenuhan kebutuhan induk dan benih bermutu secara mandiri
3. Mendorong tumbuhnya industri penghasil sarana/peralatan/mesin perikanan budidaya di dalam daerah sesuai standar.
4. Pengembangan perikanan budidaya secara intensif dan berkelanjutan.

5. Peningkatan kualitas induk dan benih melalui sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).
6. Peningkatan daya saing produk perikanan budidaya melalui sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sehingga proses budidaya dapat menghasilkan produk yang aman dikonsumsi.
7. Peningkatan kapasitas prasarana (infrastruktur) perikanan budidaya yang efisien dan modern.
8. Pengembangan komoditas unggulan.
9. Penerapan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan dan sesuai dengan daya dukung.
10. *Backyard Aquaculture* (budidaya di pekarangan) dan pemanfaatan lahan marginal.
11. Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan species ikan tahan perubahan lingkungan.
12. Pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya
13. Menggerakkan GERPARI (Gerakan Pakan Ikan Mandiri)

- **Produksi Perikanan Tangkap**

Capaian Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2024 memiliki target 157.199,87 ton dengan realisasi 125.775,57 ton atau 80,01 % belum tercapai angka 100 %. Menurunnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2024 disebabkan :

1. kurang memadainya Sarana Penangkapan ikan nelayan, Pola penangkapan yang one day trip, Armada penangkapan masih didominasi ukuran berskala kecil, dan Pelaksanaan pendataan masih kurang optimal yang disebabkan jumlah SDM Pendata dengan luas wilayah pendataan yang tidak ideal.
2. Mayoritas nelayan di Provinsi Riau merupakan nelayan kecil dengan area penangkapan ikan dipesisir. hal ini menyebabkan ikan hasil tangkapan sedikit.
3. Penurunan produksi terbesar terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir disebabkan oleh :
  - Pelaksanaan Pendataan kembali sarana penangkapan ikan sehingga data penunjang khususnya jumlah RTP dan Armada mengalami perubahan;
  - Jumlah trip/hari melaut nelayan berkurang, jumlah RTP dan armada pada perairan laut dan Perairan Daratan mengalami penurunan;
  - Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan daratan merupakan nelayan sambilan bukan nelayan penuh sehingga RTP dan nelayan yang melakukan penangkapan ikan berkurang.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Penangkapan, seperti Penerbitan Izin Usaha Penangkapan ikan sebanyak 200 rekomendasi izin.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target perikanan tangkap:

1. Kegiatan Pengembangan Usaha perikanan tangkap dengan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada nelayan/kelompok nelayan
2. Pembentukan kelompok nelayan tangkap.
3. Pemberian bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan.
4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota untuk melibatkan penyuluh perikanan dalam pelaksanaan pendataan hasil produksi perikanan tangkap.

### **Produksi Hasil Olahan Perikanan**

Target Capaian Produksi Hasil Olahan Perikanan pada tahun 2024 sebesar 19.738,45 dengan realisasi capaian 15.514,06 atau 78,60 %.

Menurunnya Produksi Hasil Olahan Perikanan pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Perubahan cuaca yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku (kabupaten Bengkalis, Pelalawan);
2. Permintaan pasar dan minat masyarakat terhadap hasil olahan mengalami penurunan karena lebih memilih ikan segar (Kabupaten Siak);
3. Beberapa UPI tidak berproduksi karena pelaku usaha yang sudah tua dan tidak ada keluarga yang melanjutkan usaha, meninggal dunia, dan beralih ke profesi lain (Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi);
4. Adanya perubahan cara menghitung produk olahan segar di kabupaten Kampar yang pada tahun 2023 semua produk ikan segar dimasukkan kedalam produk olahan segar. Sedangkan pada tahun 2024 yang dimasukkan kedalam produk olahan segar hanya ikan segar yang mengalami perlakuan.

Upaya yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau di pencapaian kinerja Tahun 2024 dalam produksi hasil olahan perikanan sebagai berikut :

1. Menampilkan produk perikanan melalui pameran;
2. Melakukan pembinaan mutu hasil produk olahan ikan dalam menciptakan SDM UPI yang berkualitas sehingga produknya bisa dijual ke provinsi dan negara tetangga;
3. Melakukan Koordinasi dengan dinas terkait untuk pengembangan produk olahan;
4. Diversifikasi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan.

## **5. Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan**

Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan yaitu Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (%) memiliki target 59,05 % realisasi 59.05 % atau 100 % mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu realisasi Presentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2024 memiliki realisasi sebesar 87,59%. Tingginya capaian persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan ini karena telah aktif kegiatan pengawasan yang dilakukan

## **6. Meningkatnya tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil**

Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu Persentase Pengolahan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%) pada tahun 2024 memiliki target 11.66%, realisasi 11,66% atau 100%. Terpenuhinya Capaian Presentase Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dikarenakan upaya yang dilakukan dengan percepatan proses integrasi RZWP3K kepada RTRW Provinsi Riau, sehingga legalitas pemanfaatan, dan pengembangan wilayah pesisir di Provinsi Riau dapat berjalan.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai fungsi berdasarkan atas asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau berkoordinasi dengan instansi terkait pada pemerintahan daerah serta instansi vertikal dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Tugas utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau antara lain bidang administrasi kesekretariat, perikanan budidaya, bidang perikanan tangkap, bidang pengawasan kelautan, bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang implementasikan melalui peningkatan nilai produksi hasil perikanan, peningkatan konsumsi ikan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan atas asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Pada pelaksanaan tugas Kepala Dinas dibantu oleh sekretariat dan bidang-bidang sesuai dengan fungsi teknisnya di dalam mengkoordinasikan kegiatan, antara lain untuk kegiatan administrasi perencanaan anggaran dan evaluasi dilaksanakan oleh sekretariat, untuk pelaksanaan teknis kegiatan perikanan budidaya dilaksanakan oleh bidang perikanan budidaya, kegiatan perikanan tangkap dilaksanakan oleh bidang perikanan tangkap, untuk kegiatan pengawasan dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan oleh bidang kelautan dan

pengawasan serta pada kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan yang meliputi pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar dan promosi serta usaha dan logistik.

Untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang dari aspek teknis dibantu oleh unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan spesifikasi teknisnya yaitu unit pelaksana teknis (UPT), meliputi :

1. Budidaya perikanan yang mengurus produksi benih dan pengembangan benih budidaya air payau dan laut.
2. Penerapan mutu hasil perikanan yang mengurus masalah mutu hasil perikanan
3. Pelabuhan perikanan yang menangani kegiatan pelabuhan untuk kapal-kapal perikanan di wilayah perairan provinsi Riau
4. Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah I yang menangani pengendalian dan pengawasan sumberdaya I serta penegakan hukum kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indragiri Hilir dengan area sungai kabupaten Pelalawan.
5. Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah II yang menangani pengendalian dan pengawasan sumberdaya II serta penegakan hukum kelautan dan perikanan di wilayah perairan Merantian Siak
6. Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah III yang menangani pengendalian dan pengawasan sumberdaya III serta penegakan hukum kelautan dan perikanan di wilayah perairan Rokan Hilir dengan Wilayah jelajah Kota Dumai.

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi dari bidang teknis dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3. Keterkaitan Masalah dengan Isu Strategis

<b>Program</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis</b>	<b>Rencana Perumusan Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas</b>
Perikanan Tangkap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya penurunan SDI dan Over Fishing pada beberapa perairan</li> <li>2. Masih dominannya armada penangkapan ikan skala kecil</li> <li>3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelabuhan belum memenuhi standar</li> </ol>	Masih rendahnya produktivitas tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap sampai 12 Mill</li> <li>- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap untuk Perairan Umum</li> </ul>

Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan benih dan induk bermutu masih rendah</li> <li>2. Belum berkembangnya skala usaha perikanan budidaya</li> <li>3. Sarana dan prasarana perikanan budidaya belum memadai</li> <li>4. SDM dengan keahlian tertentu dibidang budidaya payau dan laut terbatas</li> <li>5. Komoditas jenis ikan yang dihasilkan terbatas</li> <li>6. Sarana dan prasarana budidaya yang memenuhi persyaratan teknis masih kurang</li> </ol>	Masih rendahnya produktivitas budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut</li> <li>- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat</li> </ul>
Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya SDM dan penguasaan teknologi produksi perikanan non konsumsi</li> <li>2. Terbatasnya SDM dan penguasaan teknologi produk olahan hasil perikanan</li> <li>3. Terbatasnya akses permodalan dalam mendukung tataniaga pemasaran hasil perikanan</li> <li>4. Biaya operasional monitoring keamanan pangan produk perikanan masih rendah</li> <li>5. Biaya operasional pengujian mutu masih terbatas</li> <li>6. Sarana, prasarana, SDM UPT PMHP masih terbatas</li> </ol>	Rendahnya industrialisasi produk hasil kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</li> </ul>
Kelautan dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan</li> <li>2. Sarana, prasarana, SDM dan biaya operasional pengawasan terbatas</li> <li>3. Terbatasnya SDM PPNS yang memiliki sertifikasi</li> <li>4. Rendahnya biaya operasional pengawasan di wilayah Provinsi Riau Sarana dan prasarana UPT masih rendah</li> </ol>	Belum optimalnya pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil</li> <li>- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil</li> <li>- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya</li> </ul>

Adapun permasalahan – permasalahan yang ada pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Riau belum dapat menyelesaikan seluruh permasalahan pokok diantaranya adalah kemiskinan nelayan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta keterbatasan sarana dan prasarana.
- b. Terjadinya inflasi harga-harga kebutuhan bahan pokok yang menyebabkan harga bahan baku pakan ikan ikut melonjak dan berakibat pada semakin tingginya biaya produksi.
- c. Masih rendahnya nilai tambah budidaya perikanan karena sebagian besar masih dijual berupa ikan segar, belum berupa hasil industri sebagaimana yang kita harapkan.
- d. Masih terjadi *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hilir yang menggunakan pukat harimau (Trawl), cantrang, dan lampara yang berpotensi menimbulkan konflik antara nelayan dan penurunan stok ikan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yaitu:

Tantangan meliputi :

- Sumberdaya Ikan yang semakin terbatas pada zona penangkapan dbawah 4 mil,
- IUU Fishing (Illegal, unreported, unregulated) diantaranya Pelaku usaha melakukan operasional penangkapan ikan tidak dilengkapi dokumen perizinan,
- Ketimpangan Pemanfaatan : Konflik Antar Wilayah Nelayan, Alat Tangkap Yang Tidak Ramah Lingkungan
- Kebiasaan nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara one day trip / one day fishing
- Harga pakan ikan relatif mahal sementara 70 persen ongkos produksi untuk pembelian pakan ikan
- Sebagian besar usaha perikanan budidaya masih di skala usaha mikro kecil
- Keterbatasan kewenangan yang tercantum pada permendagri no. 90 tahun 2019 bahwa pembinaan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)/UMKM yang berskala menengah dan besar.
- belum optimalnya peningkatan kapasitas dan stabilitas pemenuhan bahan baku bagi usaha pengolahan ikan yang berkelanjutan, serta belum optimalnya promosi hasil usaha pengolahan unit pengolahan ikan
- Adanya Kewenangan Pengelolaan Ruang Laut 0-12 Mil dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Masih minimnya sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki UPT berupa kapal pengawas maupun kendaraan pengawas dalam menunjang

kinerja patroli pengawasan dari 0 s/d 12 mil laut sesuai kewenangan yang dimiliki.

- Masih sering terjadi konflik sosial baik yang melibatkan sesama nelayan dalam satu Kabupaten maupun antar Kabupaten

Peluang meliputi :

- Tersedianya SDM sektor Perikanan Tangkap cukup banyak dan terampil serta membuka lapangan kerja baru dengan jumlah nelayan 57.607 orang nelayan.
- Sumber daya ikan masih tersedia di WPP 711 (Laut China Selatan dengan potensi lestari 767.126 Ton) dan WPP 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman dengan potensi lestari 425.444 Ton).
- Potensi Perikanan Budidaya yang sangat besar 237.639,37 ha terdiri dari perikanan air tawar 57.340,12 ha, air laut 149.030,68 ha dan air payau 31.268,57 ha.
- Adanya kampung kakap putih (Kab. Kep. Meranti) dan kampung patin (Kab. Kampar) di Riau
- Dukungan pemerintah bagi kemudahan birokrasi perizinan pengolahan perikanan
- Adanya Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri dan telah dicadangkan oleh gubernur.
- Kebutuhan Benur Udang Vaname di Provinsi Riau mencapai 2,3 milyar ekor/tahun
- Jumlah pelaku usaha pembenihan rakyat (UPR) ikan air tawar cukup tinggi di Provinsi Riau

## 2.4 **Reviu Terhadap Rencana Awal RKPD**

Review terhadap RKPD Provinsi Riau tahun 2026 dilakukan untuk membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Untuk merumuskan Program atau Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2026 upaya dalam menunjang aspek perencanaan yang mencakup semua sector Kelautan dan Perikanan melalui Peningkatan Koordinasi antar Stakeholder, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang lainnya serta pemutakhiran data yang akurat untuk menghasilkan perencanaan yang optimal.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dibandingkan dengan RKPD Tahun 2026 terdapat beberapa catatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat penyesuaian indikator Program dan penyesuaian kekurangan pendanaan.
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdapat

penyesuaian indikator program kegiatan dan sub kegiatan serta target indikator.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdapat penyesuaian indikator program kegiatan dan sub kegiatan serta target indikator. Dari kegiatan ini akan menghasilkan usaha pengolahan skala menengah dan besar.

Hasil review RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 disajikan pada tabel 4.

**Tabel. 2.4**  
**KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN PERIODE 2026 (Tabel T-C 31)**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikatorr Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikatorr Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>SEKRETARIAT</b>				<b>35,174,363,891.48</b>	<b>SEKRETARIAT</b>				<b>30,202,614,262</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 Persen</b>	<b>35,174,363,891.48</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 Persen</b>	<b>30,202,614,262</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>35,021,028.98</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>150,000,000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	19,999,760.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50,000,000	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	15,021,268.98	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50,000,000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>31,944,949,844</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi</b>	<b>5 Laporan</b>	<b>24,717,817,818</b>	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/ Bulan	31,944,949,844	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang	24,717,817,818	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>49,785,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>378,000,000</b>	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	220,000,000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	49,785,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14 Laporan	70,000,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	88,000,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6 Jenis</b>	<b>552,441,931.50</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>	<b>6 Jenis</b>	<b>1,246,766,873</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	90,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	126,231,495.50	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	50,000,000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	46,760,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	235,002,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	49,450,436	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	103,300,873	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	330,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155 Laporan	738,464,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11 Dokumen	30,000,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>2,268,280,311</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>3,147,549,151</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1,889,992,983	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1,769,992,995	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44 Laporan	378,287,328	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44 Laporan	1,377,556,156	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>160,494,125</b>	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	135,494,125	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25,000,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>27 Jenis</b>	<b>323,885,776</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	<b>27 Jenis</b>	<b>401,986,295</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	277,445,776	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	167,166,295	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	278 Unit	46,440,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	278 Unit	135,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99,820,000	
	<b>Bidang Kelautan dan Pengawasan</b>				<b>328,092,460</b>	<b>Bidang Kelautan dan Pengawasan</b>				<b>1,480,974,630</b>	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>		<b>Persentase Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang meningkat efektivitas pengelolaannya (%)</b>	<b>11,70%</b>	<b>328,092,460</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Persentase Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang meningkat efektivitas pengelolaannya (%)</b>	<b>11,70%</b>	<b>1,480,974,630</b>	

	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Pekanbaru</b>	<b>Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola (Ha)</b>	<b>126097,64 ha</b>	<b>283,069,460</b>	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Pekanbaru</b>	<b>Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola (Ha)</b>	<b>205601,64 Ha</b>	<b>1,105,974,630</b>	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Provinsi Riau	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	18536,10 Ha	146,949,460	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Provinsi Riau	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	201491.72	650,000,000	
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Riau	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2 Ha	136120000	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Riau	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	6 Ha	264338068	
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil	Provinsi Riau	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana WP3K	-	-	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil	Provinsi Riau	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana WP3K	50 Orang	100,000,000	
	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K	Pekanbaru	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	-	-	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K	Pekanbaru	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	91,636,562	
	<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>		<b>Jumlah Izin yang Diterbitkan</b>	<b>9 izin</b>	<b>45,023,000</b>	<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>		<b>Jumlah Izin yang Diterbitkan</b>	<b>9 Izin</b>	<b>75,000,000</b>	
	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	45,023,000	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Provinsi Riau	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomedasi	75,000,000	

	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan</b>	-	-	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan</b>	<b>18 Kelompok</b>	<b>300,000,000</b>	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Riau	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Riau	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	150,000,000	
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Riau	Jumlah kelompok Masyarakat yang mengikuti penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau - pulau kecil	-	-	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Riau	Jumlah kelompok Masyarakat yang mengikuti penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau - pulau kecil	2 Kelompok	150,000,000	
	<b>BIDANG TANGKAP</b>				<b>1,123,447,580</b>	<b>BIDANG TANGKAP</b>				<b>5,842,652,454</b>	
			<b>Jumlah Produksi Perikanan(Ton)</b>	<b>256,855.60</b>				<b>Jumlah Produksi Perikanan(Ton)</b>	<b>256,855.60</b>		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)</b>	<b>128,100.00</b>	<b>1,123,447,580</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)</b>	<b>128,100.00</b>	<b>5,842,652,454</b>	
	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>		<b>Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan</b>	<b>2 Wilayah</b>	<b>667,976,000</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>		<b>Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan</b>	<b>3 Wilayah</b>	<b>3,925,995,811</b>	

	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Provinsi Riau	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	104,530,000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Provinsi Riau	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	200,000,000	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Provinsi Riau	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	330 Unit	563,446,000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Provinsi Riau	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2 Unit	300,000,000	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Provinsi Riau	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Provinsi Riau	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1522 Unit	3,425,995,811	
	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan</b>	<b>1 Wilayah</b>	<b>412,891,580</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan</b>	<b>4 Wilayah</b>	<b>1,680,000,000</b>	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Provinsi Riau	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	-	-	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Provinsi Riau	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	180,000,000	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Provinsi Riau	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	287 Unit	412,891,580	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Provinsi Riau	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	45 Unit	1,500,000,000	

	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>		<b>Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan</b>	<b>180 Izin</b>	<b>42,580,000</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>		<b>Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan</b>	<b>180 Izin</b>	<b>236,656,643</b>	
	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Provinsi Riau	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	42,580,000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Provinsi Riau	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	160 Rekomendasi	85,000,000	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30GT	Provinsi Riau	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-	-	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30GT	Provinsi Riau	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Dokumen	151,656,643	
	<b>BIDANG BUDIDAYA</b>				<b>582,465,929</b>	<b>BIDANG BUDIDAYA</b>				<b>4,716,637,138</b>	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Provinsi Riau	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton), Ekor</b>	<b>128,755.60</b>	<b>582,465,929</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Provinsi Riau	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton), Ekor</b>	<b>128,755.60</b>	<b>4,716,637,138</b>	

	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	-	-	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>5 izin</b>	<b>20,000,000</b>	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Provinsi Riau	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-	-	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Provinsi Riau	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen	20,000,000	
	<b>Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>		<b>Jumlah Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang di terbitkan yang di terbitkan</b>	-	-	<b>Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>		<b>Jumlah Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang di terbitkan yang di terbitkan</b>	<b>3 izin</b>	<b>20,000,000</b>	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Provinsi Riau	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	-	-	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Provinsi Riau	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	20,000,000	
	<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah</b>	-	-	<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah</b>	<b>3 Kawasan</b>	<b>70,000,000</b>	

	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Rekomendasi	70,000,000	
	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>		<b>Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan</b>	<b>3 Kawasan</b>	<b>159,695,929</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>		<b>Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan</b>	<b>3 Kawasan</b>	<b>2,506,637,138</b>	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70,000,000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Provinsi Riau	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Provinsi Riau	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	6 Unit	709,974,138	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan ikan di laut	Provinsi Riau	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	-	-	Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan ikan di laut	Provinsi Riau	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	12 Unit	1,500,000,000	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Pembudidaya	50 Orang	51,580,000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Pembudidaya	90 Orang	125,000,000	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	10 unit	108,115,929	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	10 Dokumen	101,663,000	

	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>		<b>Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan</b>	-	422,770,000.00	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>		<b>Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan</b>	<b>5 Kawasan</b>	<b>2,100,000,000</b>	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit	422,770,000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	1,100,000,000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	1,000,000,000	
	<b>Bidang P2HKP</b>				<b>195,000,000</b>	<b>Bidang P2HKP</b>				<b>1,112,500,000</b>	
	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Provinsi Riau	<b>Volume Produk hasil olahan perikanan (Ton)</b>	<b>17,306.21</b>	<b>195,000,000.00</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Provinsi Riau	<b>Volume Produk hasil olahan perikanan (Ton)</b>	<b>17,306.21</b>	<b>1,112,500,000.00</b>	

	<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Meningkatnya perizinan berusaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>	<b>3 Rekomendasi</b>	<b>16,706,500.00</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Jumlah izin usaha pemasaran dan pemrosesan hasil yang diterbitkan</b>	<b>6 izin</b>	<b>50,000,000.00</b>	
	Penertiban rekomendasi perizinan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha subsektor pengolahan ikan dan subsektor pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar	Provinsi Riau	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	3 Rekomendasi	16,706,500.00	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	6 Rekomendasi	50,000,000.00	
	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Meningkatnya mutu,keamanan dan konsumsi makan ikan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>178,293,500</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan</b>	<b>4 Unit</b>	<b>57,500,000</b>	
	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	2 Kegiatan	152,623,500						

	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Provinsi Riau	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Kegiatan	25,670,000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Provinsi Riau	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	4 Unit	57,500,000	
	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Hasil Perikanan Yang Tersedia</b>	-	-	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Hasil Perikanan Yang Tersedia</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>1,005,000,000</b>	
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	925,000,000	
	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan Insentif dan Fasilitasi	-	-	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan Insentif dan Fasilitasi	1	80,000,000	
	<b>BIDANG KP</b>				<b>50,000,000</b>	<b>BIDANG KP</b>				<b>1,000,000,000</b>	
			Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)	70				Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)	70		

	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Provinsi Riau	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	5 Kasus	50,000,000	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Provinsi Riau	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	5 Kasus	1,000,000,000	
	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi</b>	-	-	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi</b>	270 Pelaku Usaha	600,000,000	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Provinsi Riau	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Akti	-	-	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Provinsi Riau	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Akti	2 Kelompok masyarakat	560,000,000	
	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	-	-	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	2 Forum	40,000,000	
	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan</b>	16 Dokumen	50,000,000	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan</b>	40 Dokumen	400,000,000	

	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Riau	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	4 Pelaku Usaha	13,120,000	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 Dokumen	100,000,000	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	-	-	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	10 Dokumen	200,000,000	
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan Provinsi Kewenangannya	Provinsi Riau	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	36,880,000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	20 Pelaku Usaha	100,000,000	
	<b>UPT.PSDKP WIL 1</b>				<b>192,769,080</b>	<b>UPT.PSDKP WIL 1</b>				<b>686,438,654</b>	

	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	<b>121,300,017</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	<b>281,438,654</b>	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	6 Jenis	<b>6,869,537</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi</b>	6 Jenis	<b>91,321,094</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,569,737	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	23,084,900	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	10,040,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	239,800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1,736,194	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3,060,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	56,460,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 Jenis	<b>108,142,080</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	2 Jenis	<b>106,170,240</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	108,142,080	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	106,170,240	

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	3 Jenis	<b>6,288,400</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>83,947,320</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	482,400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	23,947,320	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5,036,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	50,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	770,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	10,000,000	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>	Jumlah Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Ditangani	5 Kasus	<b>71,469,063</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)</b>	<b>5.00</b>	<b>405,000,000</b>	
	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi</b>	80 Pelaku Usaha	<b>71,469,063</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi</b>	<b>80</b>	<b>405,000,000</b>	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	7 Dokumen	30,000,000	

	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	63,089,063	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	5 Dokumen	345,000,000	
	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	8,380,000	Pengawasan Pemanfaatan RuangLaut sampai dengan 12 Mi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah Dokumen Hasil PengawasanPemanfaatan Ruang Laut sampaidengan 12 Mil	2 Dokumen	30,000,000	
	<b>UP.PSDKP WIL 2</b>				<b>354,524,120</b>	<b>UP.PSDKP WIL 2</b>				<b>707,778,528</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	<b>252,033,120</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	<b>302,778,528</b>	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	6 Jenis	<b>31,426,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)</b>	6 Jenis	<b>116,165,896</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	70,618,140	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	7,728,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1,636,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2,599,756	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	24,790,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35,220,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 Jenis	<b>158,290,176</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>118,717,632</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	158,290,176	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	118,717,632	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	3 Unit	<b>62,316,944</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</b>	<b>3 Unit</b>	<b>67,895,000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	17,286,944	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	17,895,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	45,030,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	50,000,000	

	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		<b>Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani</b>	<b>5 Kasus</b>	<b>102,491,000</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		<b>Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani</b>	<b>5.00</b>	<b>405,000,000</b>	
	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi</b>	<b>88 Pelaku usaha</b>	<b>102,491,000</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>			<b>88</b>	<b>405,000,000</b>	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mi	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mi	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	7 Dokumen	30,000,000	
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	60 Pelaku Usaha	72,221,000	Pengawasan Usaha Tangkap sampai dengan 12 Mil	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	5 Dokumen	345,000,000	
	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	4 Pelaku Usaha	30,270,000	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	2 Dokumen	30,000,000	
	<b>UPT.PSDKP WIL 3</b>				<b>312,925,468.52</b>	<b>UPT.PSDKP WIL 3</b>				<b>819,246,089</b>	

	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	<b>136,100,469</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	<b>390,245,609</b>	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	6 Jenis	<b>23,136,547</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi</b>	6 Jenis	<b>58,751,896</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3,656,547	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20,357,774	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	7,728,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	500,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2,031,122	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	18,980,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	28,635,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	2 Jenis	<b>4,707,600</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	2 Jenis	<b>58,374,433</b>	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4,707,600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	58,374,433	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	3 Jenis	<b>79,145,088</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	3 Jenis	<b>176,869,968</b>	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	79,145,088	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	176,869,968	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	3 Jenis	<b>29,111,234</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>96,249,312</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	12,161,234	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	11,249,312	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	15,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	80,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	1,950,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	5,000,000	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		<b>Jumlah Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Ditangani</b>	<b>5 Kasus</b>	<b>176,825,000</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		<b>Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani (kasus)</b>	<b>5</b>	<b>429,000,480</b>	
	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi</b>	105 Pelaku usaha	<b>176,825,000</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi</b>	<b>105</b>	<b>429,000,480</b>	

	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mi	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mi	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	7 Dokumen	30,000,000	
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	28 Pelaku Usaha	176,825,000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	5 Dokumen	369,000,480	
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	2 Dokumen	30,000,000	
	<b>UPT.Budidaya Perikanan</b>				<b>1,859,596,614</b>	<b>UPT.Budidaya Perikanan</b>				<b>5,637,649,099</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100 Persen	<b>732,001,888</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100 Persen	<b>1,232,822,852</b>	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	4 Jenis	<b>67,400,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi</b>	4 Jenis	<b>145,098,189</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	15,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	42,710,794	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	12,387,395	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	2,400,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	12,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	50,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	78,000,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1 Jenis	<b>532,781,568</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	1 Jenis	<b>702,490,663</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	532,781,568	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	702,490,663	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	3 Jenis	<b>131,820,320</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</b>	3 Jenis	<b>385,234,000</b>	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	107,265,320	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	105,234,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	24,555,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	80,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	200,000,000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>128.755,6 Ton</b>	<b>1,127,594,726</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)</b>	<b>128,755.60</b>	<b>4,404,826,247</b>	
	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>		<b>Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan</b>	<b>4 Kawasan</b>	<b>1,127,594,726</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>		<b>Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan</b>	<b>5 Kawasan</b>	<b>4,404,826,247</b>	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pekanbaru	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit	1,127,594,726	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pekanbaru	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 unit	1,848,476,247	

	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pekanbaru, Bengkalis, dan Kampar	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pekanbaru, Bengkalis, dan Kampar	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	2,556,350,000	
	<b>UPT.PMHP</b>				<b>194,263,929</b>	<b>UPT.PMHP</b>				<b>682,946,443</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100 Persen	<b>144,275,929</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 Persen</b>	<b>394,436,313</b>	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	6 Jenis	<b>20,130,841</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)</b>	<b>6 Jenis</b>	<b>28,672,064</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3,000,985	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9,972,206	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2,139,856	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2,139,858	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14,990,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	16,560,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 jenis	<b>79,145,088</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>2 jenis</b>	<b>289,740,411</b>	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	79,145,088.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	289,740,410.96	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>45,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>76,023,838</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	15,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	21,023,838	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	50,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	5,000,000	
	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>	Volume Produk hasil olahan perikanan	17,306.21	<b>49,988,000</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Volume Produk hasil olahan perikanan</b>	<b>17,306.21</b>	<b>288,510,130</b>	
	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>		<b>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan</b>	<b>4 unit</b>	<b>49,988,000</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>		<b>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>288,510,130</b>	

	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi Riau	Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan	49,988,000	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi Riau	Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	10 sampel	288,510,130	
	<b>UPT.PELABUHAN PERIKANAN</b>	<b>Kota Dumai</b>			<b>702,904,908</b>	<b>UPT.PELABUHAN PERIKANAN</b>	<b>Kota Dumai</b>			<b>17,494,468,801</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 Persen</b>	<b>512,904,908</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 Persen</b>	<b>815,945,046</b>	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6 Jenis</b>	<b>40,638,348</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)</b>	<b>6 Jenis</b>	<b>125,696,784</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5,998,078	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	14,966,401	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,600,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4,771,943	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	4,990,270	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	9,868,440	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	28,050,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	96,090,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>287,946,560</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>384,867,120</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	287,946,560	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	384,867,120	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>184,320,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>305,381,142</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	69,770,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	49,381,142	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	114,550,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	250,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	6,000,000	
	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>		<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>	<b>128,100.00</b>	<b>190,000,000</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>		<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>	<b>140,840.00</b>	<b>16,678,523,755</b>	

	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola</b>	<b>1 Unit</b>	<b>190,000,000</b>	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola</b>	<b>1 Unit</b>	<b>16,678,523,755</b>	
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Kota Dumai	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	-	-	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Kota Dumai	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1 Unit	500,000,000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	190,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	15,715,227,000	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Kota Dumai	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	-	-	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Kota Dumai	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan	463,296,755	
					<b>41,070,353,980.00</b>					<b>70,383,906,098</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Maka perlu dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025.

Berdasarkan Forum Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat yang terkait melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan.

Dalam prosesnya Forum Perangkat Daerah, dengan mengundang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Sesuai dengan program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang telah diselaraskan dengan usulan prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Ini merupakan langkah awal untuk usulan kegiatan tahun 2026 Kab/Kota bidang kelautan dan perikanan. Maka dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dibentuk suatu tim untuk penyaringan usulan – usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota dirangkum dalam Berita Acara dan disepakati dalam hasil Forum Perangkat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota Provinsi Riau program / kegiatan tahun 2026.

Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Adapun Program / Kegiatan yang prioritas yaitu :

1. Bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan
2. Pemulihan sumberdaya ikan di perairan umum daratan
3. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
4. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya
5. Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan sarana sistem rantai dingin hasil perikanan.

Berdasarkan Tabel 5 (TC 32) diatas bahwa Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau akan memprioritaskan pada kegiatan yang mendukung peningkatan Indikator Kinerja Utama yang menjadi Program prioritas yang mendukung pembangunan, Program Prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang tertuang dalam dokumen Renstra yaitu :

1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

*Outcome* : Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan

Kegiatan :

1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
2. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
3. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

*Outcome* : Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan potensi sumber daya ikan

Kegiatan :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
4. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
5. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

*Outcome* : Meningkatnya produksi perikanan budidaya

Kegiatan :

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Dara
5. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Berikut usulan yang disampaikan oleh kelompok dan anggota masyarakat pemangku kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang akan dituangkan dalam Tabel 7 TC. 32 sebagai berikut :

Table 2.5.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026  
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (T-C.32)

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat				
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	KJA 19 Unit, Kapal Pengangkut Ikan 7 Unkt, Mesin Pakan dan sarana Pendukung Budidaya 11 unit	
	Pekanbaru			
	Pokdakan/KUB Bertuah, Pokdakan/KUB Siak Tirta Bertuah Kota Pekanbaru	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)	2	
	Inhil			
	Pokdakan Mawar	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)	1	
	Pokdakan Karya Maju, jl. Encik Abdulah Dusun Bahagia RT. 014 RW. 07 Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA),	1	
	Kep.Meranti			
	BERKAH AMIN MERANTI,SELATPANJANG KOTA, TEBING TINGGI	Pengadaan Mesin Pakan dan Sarana Pendukung Lainnya,	1	
	SAMUDERA JAYA BERSAMA BANTAR, RANGSANG BARAT	Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan Segar Budidaya,	1	

	Kuansing			
	Pokdakan Bintang Laksamana, Sungai Siriah, Titian Berangan, Sungai Tonam, Lokuak Potai Kuantan Tengah	Sarana Budidaya Ikan Air Tawar Komoditas Lokal (Komoditas Nila),	10	
	PELALAWAN			
	Kelompok Sungai Semangkuk Desa Kuala Terusan, Kec. Pkl. Kerinci	Bantuan Saprokan Keramba Jaring Apung (KJA)	1	
	Kelompok Kualo Mandiri	Bantuan Saprokan Keramba Jaring Apung (KJA)	1	
	Kelompok Sinar Harapan	Bantuan Saprokan Keramba Jaring Apung (KJA)	1	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Prasarana Budidaya 88 Unit	
	Rohul			
	Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah,Desa Babussalam Kec. Rambah, Desa Koto Tinggi Kec. Rambah, Desa Babussalam Kec. Rambah,Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai,Desa Sungai Kumango Kec. Tambusai,Desa Kabun Kec. Kabun, Desa Pagaran Tapah Kec. Pagaran Tapah Darussalam, Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto,Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto, Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto, Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu, Desa Babussalam Kec. Rambah	Bantuan Sarana dan prasarana pembudidaya ikan	11	

	Kelompok Wira Swatantra Andalan dan Kelompok Mandiri Andalan Desa Mekar Jaya Kec. Tambusai Utara dan Desa Kepenuhan Hulu Kec. Kepenuhan Hulu	GERAKAN PAKAN MANDIRI	2	
	Kep Merranti			
	BERKAH ILLAHI BANTAR, RANGSANG BARAT	Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	1	
	BERKAH ILLAHI BANTAR, RANGSANG BARAT	Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	1	
	PEMUDA PESISIR BANTAR, RANGSANG BARAT	Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	1	
	SAMUDERA JAYA BERSAMA BANTAR, RANGSANG BARAT	Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan Segar Budidaya	1	
	TERUBUK MUTIARA MERDEKA INSIT, TEBING TINGGI BARAT	Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	1	
	TERUBUK MUTIARA PERMAI INSIT, TEBING TINGGI BARAT	Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	1	
	INSIT TUAN MUDA, TEBING TINGGI BARAT	Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	1	
	TUAN MUDA INSIT, TEBING TINGGI BARAT	Pengadaan Gumbang Pendukung Budidaya Ikan Air Laut/Keramba Jaring Apung	10	

	MERANTI BUNTING, MERBAU	Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	1	
	GREM SELAT AKAR, TASIK PUTRI PUYU	Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	1	
	BERKAH AMIN MERANTI SELATPANJANG KOTA, TEBING TINGGI	Pengadaan Mesin Pakan dan Sarana Pendukung Lainnya	1	
	KARYA UTAMA SELATPANJANG TIMUR, TEBING TINGGI	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Air Tawar	1	
	BERKAH ILAHI SIALANG PASUNG, RANGSANG BARAT	Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	1	
	BERKAH SEHATI SIALANG PASUNG, RANGSANG BARAT	Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	1	
	SETIA MAJU SIALANG PASUNG, RANGSANG BARAT	Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	1	
	SETIA MAJUSIALANG PASUNG, RANGSANG BARAT	Pengadaan Gumbang Pendukung Budidaya Ikan Air Laut/Keramba Jaring Apung	10	
	TIMUR JAYASIALANG PASUNG, RANGSANG BARAT	Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya	1	
	TIMUR JAYA SIALANG PASUNG, RANGSANG BARAT	Pengadaan Gumbang Pendukung Budidaya Ikan Air Laut/Keramba Jaring Apung	10	

KAMPAR				
	Pokdakan MAJU BERSAMA Desa Merangin Kecamatan Kuok	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)		1
	Pokdakan BERKAH KERAMBA Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)		1
	Pokdakan BONCAH LABI MAJU Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)		1
	Pokdakan TUA KAMPAU Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)		1
	Pokdakan KUAPAN BERKAH Desa Kuapan Kecamatan Tambang	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)		1
	Pokdakan TANJUNG SEJATI Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)		1
	Pokdakan TOGAK BASAMO Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)		1
	Pokdakan BUKIT KINCUANG Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)		1
	Pokdakan RANAH BAROKA Desa Ranah Kecamatan Kampar	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)		1
	Pokdakan BERKAH MAJU Desa Ranah Kecamatan Kampar	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)		1
	Pokdakan SARUHUM Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)		1
	Pokdakan SEHATI Desa Merangin Kecamatan Kuok	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)		1

	Pokdakan RENGAS INDAH Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)	1	
	Pokdakan SEJAHTERA Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar	Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)	1	
	Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara	Bantuan Sarana Tiang Pancang	1	
	Pokdakan BONCAH LABI MAJU Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara	Bantuan Sarana Tiang Pancang	1	
	Pokdakan TUA KAMPAU Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara	Bantuan Sarana Tiang Pancang	1	
	Pokdakan TANJUNG SEJATI Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara	Bantuan Sarana Tiang Pancang	1	
	Pokdakan TOGAK BASAMO	Bantuan Sarana Tiang Pancang	1	
	Kecamatan Kampar Pokdakan BUKIT KINCUANG Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar	Bantuan Sarana Tiang Pancang	1	
	Pokdakan RANAH BAROKA Desa Ranah Kecamatan Kampar	Bantuan Sarana Tiang Pancang	1	
	Pokdakan BERKAH MAJU Desa Ranah Kecamatan Kampar	Bantuan Sarana Tiang Pancang	1	
	Pokdakan SARUHUM Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar	Bantuan Sarana Tiang Pancang	1	
	Pokdakan SEHATI Desa Merangin Kecamatan Kuok	Bantuan Sarana Tiang Pancang	1	
	Bantuan Sarana Tiang Pancang Pokdakan RENGAS INDAH Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu	Bantuan Sarana Tiang Pancang	1	

	Pokdakan SEJAHTERA Desa Bulit Ranah Kecamatan Kampar	Bantuan Sarana Tiang Pancang	1	
	Pokdakan TANJUNG BELIT HATCHERY Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar	Bantuan Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	1	
	Pokdakan BERKAH JAYA, Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja	Bantuan Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	1	
SIAK				
	\(Keramba HDPE untuk 1 Kelompok), 1. GAPOKKAN Rawa Bersatu 1. Kampung Sungai Rawa Kec. Sungai Apit	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Kakap Putih	1	
	\(Keramba HDPE untuk 1 Kelompok) 1. KUB Bangkit Maju 1. Kampung Sei. Kayu Ara	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Tirus	1	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		1558 Unit Alat tangkap	
Rohil				
	KUB Nelayan Barokah Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas	Bantuan Alat Tangkap Nelayan	10	

	KUB Nelayan Amanah Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir	Bantuan Jaring Penangkapan Ikan	10	
	KUB Nelayan Bersatu Jl. Garuda Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kapas	Bantuan Kapal Kualuh & Alat Tangkap	10	
	Meranti			
	Kel. Nelayan Semoga Jaya Desa Kedabu Rapat Kec. Rangsang Pesisir	Pengadaan Kapal Motor dan Alat Tangkap Ikan (Jaring tangsi 0.30 mm)	5	
	Kel. Nelayan Delima Bahari Desa Melai Kec. Rangsang Barat	Pengadaan Kapal Motor dan Alat Tangkap Ikan (Jaring tangsi 0.30 mm)	3	
	Kel. Nelayan Al-Baroqah Desa Tanjung Kedabu Kec. Rangsang Pesisir	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan (Jaring tangsi) 0.30 mm , 2½"	300	
	Bengkalis			
	KUB CAHAYA LAUT Desa Meskom Kecamatan Bengkalis	Bantuan Sarana Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2,75 Inchi	200	
	KUB KUDA LAUT Desa Meskom Kecamatan Bengkalis	Bantuan Sarana Alat Penangkapan Ikan Gillnet 3 Inchi	200	
	KUB MUARA KASIH Desa Senderak Kecamatan Bengkalis	Bantuan Sarana Alat Penangkapan Ikan Tramelnet	300	
	KUB NELAYAN HARAPAN Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis	Bantuan Sarana Alat Penangkapan Ikan Gillnet 2,75 Inchi	200	
	SIAK			
	3 Kelompok 1. KUB Nelayan Penyengat 2. KUB Rawa Bersatu 3. KUB Maju Bersama 1. Kampung Penyengat Kec. Sungai Apit 2. Kampung Sungai Rawa Kec. Sungai Apit 3. Kampung Tanjung Kuras Kec. Sungai Apit	Bantuan Sarana Alat Penangkapan Ikan Jaring	300	

	1 Kelompok 1. KUB Bilis Asam 2. KUB Bangkit Maju 1. Kampung Bunsur Kec. Sungai Apit 2. Kampung Sungai Kayu Ara Kec. Sungai Apit	Bantuan Sarana Alat Penangkapan Ikan Gombang	20	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi				
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat		Kapal 249 Unit, dan Alat tangkap 463 Unit	
Pekanbaru				
	KUB Mina Betutu Jl. Kemping RT 04 RW 07 Kel. Lembah Sari, Kec. Rumbai Timur.	Pengadaan Kapal Fiber 1 GT dan Mesin beserta kelengkapannya.	50	
	KUB Mina Gurami Jl. Raja Panjang RT 03 RW 05 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Timur.	Pengadaan Kapal Fiber 1 GT dan Mesin beserta kelengkapannya.	50	
	KUB Mina Patin Pesisir Jl. Tanjung Batu RT 02 RW 03 Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh	Pengadaan Kapal Fiber 1 GT dan Mesin beserta kelengkapannya.	50	
Kuansing				
	KUB Lubuk Karak, KUB Alay Jaya Cerenti	Bantuan Perahu bermotor (fiber)	49	
	KUB Lubuk Karak, KUB Alay Jaya Cerenti	Bantuan Sarana Alat Tangkap Jaring, Pancing, Jala	147	
KAMPAR				
	KUB NELAYAN BAUNG TAPUNG Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu	Bantuan Sampan/Perahu Fiber, Mesin dan Alat Penangkapan Ikan (Jala)	10	

	KUB NELAYAN BERKAH Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu	Bantuan Sampan/Perahu Fiber, Mesin dan Alat Penangkapan Ikan (Jala)	10	
INHU				
	KELOMPOK JAYA BERSAMA NELAYAN Desa Teluk Sungkai Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	Pengadaan Jaring Insang mesh size 4-5 Inchi KELOMPOK JAYA BERSAMA NELAYAN Desa Teluk Sungkai Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	48	
	KELOMPOK RANTAU BERTUAH Desa Sukajadi Kecamatan Kuala Cenaku Kab .Inhu	Pengadaan Jala Tebar spesifikasi : Bahan Benang Panjang 3 Meter Lebar 6 meter Mesh size 3/4 inci Ukuran Benang No. 9 KELOMPOK RANTAU BERTUAH Desa Sukajadi Kecamatan Kuala Cenaku Kab .Inhu	16	
	KELOMPOK CENAKU BERTUAH Desa Kuala Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku Kag inhu	Pengadaan Jala Tebar spesifikasi : Bahan Benang Panjang 3 Meter Lebar 6 meter Mesh size 3/4 inci Ukuran Benang No. 9 KELOMPOK CENAKU BERTUAH Desa Kuala Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku Kag inhu	12	
	2 kelompok , 1. KUB Binjai Jaya 2. KUB Janggut Udang 1. Kampung Teluk Batil Kec. Sungai Apit 2. Kampung Belading Kec. Sabak Auh	Bantuan Sarana Alat Penangkapan Ikan Jaring	200	

	2 Kelompok 1. KUB Jaya Bersama 2. KUB Patin Jaya 1. Kampung Teluk Masjid Kec. Sungai Apit 2. Kampung Teluk Batil Kec. Sungai Apit	Bantuan Kapal Perikanan 2 Kelompok	30	
	PELALAWAN			
	KUB Rezeki Berkah Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan	Pengadaan Alat tangkap pengilar 1 1/4"	10	
	KUB Selempaya Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan	Pengadaan Alat tangkap pengilar 1 1/4"	10	
	KUB Sungai Selingsing Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan	Pengadaan Jaring 2.5 inchi	10	
	Pengadaan Jaring 2 inchi	Pengadaan Jaring 2 inchi	10	

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional RPJMN 2025-2029, yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025, adalah tahap pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan merupakan penjabaran dari visi-misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam upaya mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melanjutkan pelaksanaan 5 program prioritas berbasis Ekonomi Biru di tahun 2026 ini. Strategi ekonomi biru merupakan upaya Indonesia dalam menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan ekologi dan ekonomi, merevitalisasi kesehatan laut, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan. Lima program ekonomi biru yaitu :

1. Perluasan kawasan konservasi laut
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota
3. pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan
4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi Nelayan.

Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan:

1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 juta ton, dan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun
2. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional Meningkatkan produksi perikanan tangkap menjadi 10,10 juta ton, dan nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8 miliar pada 2024
3. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan rata-rata 5% dan 10% per tahun (target SDGs), serta produktivitas komoditas 5% per tahun

Pembangunan Kelautan dan Perikanan akan mendukung 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni: (1) ekonomi, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kontribusi Kelautan dan Perikanan pada PDB daerah, dan dampak ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan; (2) sosial, tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marjinal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) lingkungan hidup, dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tahun 2025-2029 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005- 2029, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD

tahun keempat serta isu strategis yang aktual. Perencanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Riau diarahkan pada kualitas pemerintahan yang baik. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di Provinsi Riau dilakukan melalui pengembangan usaha perikanan budidaya, khususnya budidaya perikanan air tawar melalui pengembangan kawasan sentra-sentra produksi. Pengembangan perikanan tangkap di laut dan perairan pantai maupun di perairan umum, saatnya untuk dibatasi. Kegiatan pengembangan untuk bidang tersebut adalah pengembangan nilai tambah produk hasil perikanan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau**

Terwujudnya visi Pemerintah Provinsi Riau dilakukan melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Untuk itu perlu adanya kerangka yang jelas pada misi dioperasionalkan kedalam tujuan dan sasaran. Visi Riau 2025-2029 adalah Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis Dan Maju, guna mendukung visi tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menetapkan tujuan yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Perikanan”, dalam rangka mewujudkan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai peran dalam mencapai sasaran tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau ditindaklanjuti kedalam tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perikanan dan kelautan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ke depan berdasarkan tujuan dan sasaran, Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Perikanan’, indikator 1) Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah salah satu alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Bisa dikatakan salah satu faktor yang menentukan yang menentukan tingkat penerimaan nelayan adalah jumlah tangkapan ikan oleh nelayan. 2). Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)

adalah salah satu alat ukur kesejahteraan nilai tukar pembudidaya ikan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh pembudidaya dengan harga yang dibayarkan oleh pembudidaya. Bisa dikatakan salah satu faktor yang menentukan tingkat penerimaan pembudidaya ikan adalah jumlah hasil yang diterima oleh pembudidaya. dikembangkan lebih lanjut pada Tabel 3.1. dibawah ini :

**Tabel 3.1.**  
**Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Perikanan Tahun 2026**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Base Line 2025	Target 2026
1.	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105,34	105,95
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	101,56	102,98
1.1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Hasil Perikanan (Ton)	255.915,02	256.855,60
		1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	128.115,02	128.755,6
		2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	127.800	128.100
		Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan (Ton)	16.802,33	17.306,21
1.2	Meningkatnya konsumsi ikan	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/KAP/TH)	34,06	34,75
1.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tingkat Pengelolaan Konservasi (Nilai)	56,5	56,6
1.4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	70	72

Guna pencapaian sasaran indikator Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2026 pada Tabel 3.1. Memperlihatkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mendukung misi yang ketiga yakni mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing. Dalam mencapai tujuan tersebut kepala daerah menetapkan sasaran Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai perpanjangan tangan kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan perikanan. Untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan kepala daerah, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menetapkan tujuan pembangunan Perikanan dengan memperkuat pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan sasaran meningkatnya produksi perikanan, meningkatnya konsumsi ikan, Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Strategi yang dilakukan dalam peningkatan produksi perikanan adalah dengan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Peningkatan Produksi Hasil Olahan Perikanan, Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan SDKP, Meningkatnya Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau untuk mencapai dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Untuk tahun 2026 terdapat 6 program kegiatan, yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
5. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Provinsi Riau mempunyai sumberdaya perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan baik untuk usaha perikanan tangkap maupun usaha budidaya serta pengolahan hasil perikanan, pada perikanan tangkap yaitu perairan umum dan perairan laut (kawasan pesisir). Potensi ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan penangkapan dan budidaya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan/subkegiatan tahun perencanaan 2026 yaitu :

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat pada tingkat pemanfaatan budidaya laut hanya sebesar 1,26 %, budidaya payau sebesar 9,36 % sedangkan budidaya tawar sebesar 14,10 %, masih rendahnya tingkat pemanfaatan potensi usaha budidaya di wilayah laut ini disebabkan tingginya biaya produksi dibandingkan dengan wilayah tawar atau payau. selain itu juga tingkat kesejahteraan pelaku perikanan khususnya pada sektor budidaya jika dilihat dari angka Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) rata-rata setiap tahunnya masih mencapai angka dibawah 100.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Wilayah penangkapan ikan perairan laut di Provinsi Riau berada pada 2 (dua) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yakni WPP-571 dan WPP-711. Perairan laut Provinsi Riau yang masuk pada WPP-571 adalah perairan laut di wilayah Rokan Hilir, Kota Dumai, Kab. Bengkalis, Siak, dan Kep. Meranti, dan yang masuk WPP-711 adalah perairan laut di wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir. sedangkan untuk usaha Perairan Umum Daratan (PUD) berada pada wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.

Berdasarkan data KepMen KP Nomor 19 Tahun 2022 tentang estimasi dan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan bahwa sebagian besar sumber daya ikan di perairan laut Provinsi Riau telah terjadi kondisi lebih tangkap (*over exploited*) untuk itu perlu dukungan Renja 2025 dalam pelaksanaan penangkapan ikan terukur (PIT), Penangkapan Ikan Terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali yang dilakukan berdasarkan zona tertentu dan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan nelayan, sehingga untuk mengantisipasi dalam penyelenggaraan PIT ini perlu dukungan teknis bagi nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan terukur, termasuk penggunaan alat

tangkap yang terukur dan sistem pengukuran dan pelaporannya, serta membangun infrastruktur yang diperlukan untuk penerapan kebijakan, seperti pelabuhan, dan dermaga.

Selain itu perlu dilakukan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan keberhasilan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur ini. Namun untuk melindungi nelayan di Provinsi Riau harus ditindaklanjuti dengan langkah antisipasi yang efektif dan efisien oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, khususnya sebagai upaya untuk melindungi nelayan lokal dan nelayan kecil di wilayah pesisir yang masih kategori miskin perlu di persiapkan agar tidak terpinggirkan.

### 3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan dalam rangka mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengatasi masih maraknya kapal asing pencuri ikan di perairan Provinsi Riau. Saat ini jumlah armada yang terdata di Provinsi Riau adalah 14.285 unit, yang telah memiliki izin sebanyak pelaku usaha perikanan yang memiliki izin berjumlah 915 (Tahun 2023) pelaku usaha, dengan jumlah total nelayan yang saat ini terdata di Provinsi Riau adalah sebanyak 1.472 unit, ini artinya masih sekitar 10,30% hal ini salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pengurusan perizinan, masih minim pengetahuan pelaku usaha dalam mengakses proses perijinan secara online, serta masih banyak Pelaku Usaha yang belum memiliki kelengkapan dokumen kapal seperti Pas Kecil/Pas Besar sehingga di perlukan pengawasan yang berkelanjutan dan komprehensif, sehingga di harapkan mampu untuk mengurangi pencurian ikan, serta meningkatkan ketataan hukum bagi pelaku usaha perikanan.

### 4. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut. Provinsi Riau memiliki 2 (dua) kawasan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu: 1) Kawasan Konservasi Perairan di Perairan Kepulauan Aruah dengan Keputusan Menteri Kelautan Nomor 73 Tahun 2021 dengan luasan 18.536,10 Ha, 2)Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107

Tahun 2023 dengan Luasan 126.097,64.

Sedangkan 2 (dua) kawasan lagi masih dalam proses penetapan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu: 1) Pencadangan Kawasan Konservasi Suaka Perikanan Terubuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2012 dengan luasan 40.816 Ha; 2).Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Rupa Utara dengan SK Gubernur Nomor Kpts. 565/II/2019 dengan luasan 15.547 Ha, dari data tersebut jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola di Provinsi Riau Tahun 2023.

Untuk rehabilitasi daerah pesisir dengan penanaman hutan mangrove dengan pendekatan partisipasi masyarakat, hutan mangrove bermanfaat untuk melindungi tanah di sekitar laut. Tanah akan menjadi lapisan yang lebih padat dengan adanya pohon bakau. Tanaman bakau yang tumbuh di tepian pantai akan membuat airnya jernih, serta tempat beraktivitas ikan dan udang. Kemudian Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat, adalah untuk membuat dokumen pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil (TPK) Kepulauan Aruah Rokan Hilir.

#### 5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Perlu dilakukan pembinaan Unit Usaha Pengolahan Ikan yang saat ini di Provinsi Riau memiliki Unit Pengolahan IKan (UPI) Mikro kecil sebanyak 998 (sumber one data Tahun 2023), dari 998 UPI baru 1 % yang berskala menengah besar. Masih sangat sedikit jumlah UPI yang berskala menengah besar di Provinsi Riau disebabkan beberapa faktor salah satunya adalah Mutu Produk Olahan Skala UMKM yang rendah, pengetahuan para pelaku usaha mikro dan kecil tentang standar mutu dan perizinan berusaha berbasis resiko masih rendah, terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD), tidak tersedianya *cold storage* milik Pemerintah untuk menampung hasil budidaya, tangkap dan pengolahan, belum tersedianya data harga ikan di seluruh Kabupaten / Kota serta belum optimalnya peningkatan angka konsumsi ikan. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan kepada UPI skala mikro kecil yang juga memiliki potensi dalam pengembangan produksi usaha di sektor perikanan.

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2027**  
**Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi Riau (Tabel T-C 33)**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					<b>SEKRETARIAT</b>				<b>35,174,363,891.48</b>				<b>32,787,218,133</b>
3	25	01	1.02		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	35,174,363,891				32,787,218,133
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1 Laporan	35,021,029				150,000,000
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekanbaru	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	50,000,000
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekanbaru	1 Laporan	19,999,760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	50,000,000
3	25	02	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Pekanbaru	1 Dokumen	15,021,269	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	50,000,000
3	25	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi		5 Laporan	31,944,949,844				28,462,897,852

3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pekanbaru	210 Orang/ Bulan	31,944,949,844	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		215 Orang	28,462,897,852
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>49,785,000</b>				<b>339,380,000</b>
3	25	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	250,000,000
3	25	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	14 Laporan	49,785,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14 Laporan	49,785,000
3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pekanbaru	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14 Laporan	39,595,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>		<b>6 Jenis</b>	<b>552,441,932</b>				<b>991,421,873</b>
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	25,000,000
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	5 Paket	126,231,495.50	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	200,000,000

3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	5 Paket	46,760,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	111,793,000
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pekanbaru	15 Paket	49,450,436	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Paket	103,300,873
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	1 Laporan	330,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	526,328,000
3	25	02	1.07	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pekanbaru	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Dokumen	25,000,000
3	25	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>2 Jenis</b>	<b>2,268,280,311</b>				<b>2,204,869,041</b>
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pekanbaru	4 Laporan	1,889,992,983	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	1,769,992,995
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	44 Laporan	378,287,328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	434,876,046
3	25	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>		<b>-</b>	<b>-</b>				<b>123,203,591</b>

3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pekanbaru	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14 Unit	98,203,591
3	25	02	1.08	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pekanbaru	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 Unit	25,000,000
3	25	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>		<b>27 Jenis</b>	<b>323,885,776</b>			<b>515,445,776</b>
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pekanbaru	27 Unit	277,445,776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27 Unit	277,445,776
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pekanbaru	278 Unit	46,440,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	278 Unit	138,000,000
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pekanbaru	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Unit	100,000,000
					<b>Bidang Kelautan dan Pengawasan</b>			<b>11.70%</b>	<b>328,092,460</b>			<b>186,556,382</b>
3	25	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Persentase Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang meningkatkan efektivitas pengelolaannya (%)</b>		<b>11.70</b>	<b>328,092,460</b>			<b>186,556,382</b>

3	25	02	101		<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola (Ha)</b>	<b>Pekanbaru</b>	<b>126097,64 ha</b>	<b>283,069,460</b>				<b>181,556,382</b>
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Provinsi Riau	18536,10 Ha	146,949,460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		181566.42	160,000,000
3	25	02	101	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Provinsi Riau	2 Ha	136120000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Ha	21,556,382
3	25	02	101	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana WP3K	Provinsi Riau	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Orang	
3	25	02	101	;0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Pekanbaru	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	
3	25	02	102		<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil</b>	<b>Jumlah Izin yang Diterbitkan</b>		<b>1 Izin</b>	<b>45,023,000</b>				<b>-</b>
3	25	02	102	0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau	1 Dokumen	45,023,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			

3	25	02	103		<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan</b>	Provinsi Riau	-	-				<b>5,000,000</b>
3	25	02	103	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Provinsi Riau	-	-		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60 Orang	5,000,000
3	25	02	103	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok Masyarakat yang mengikuti penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau - pulau kecil	Provinsi Riau	-	-		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Kelompok	
					<b>BIDANG TANGKAP</b>				<b>1,123,447,580</b>				<b>1,682,451,054</b>
						<b>Jumlah Produksi Perikanan(Ton)</b>		<b>256,855.60</b>	<b>274,880</b>				<b>274,880</b>
3	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)</b>		<b>128,100.00</b>	<b>1,123,447,580</b>				<b>1,682,451,054</b>
3	25	03	101		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan</b>		<b>3 Wilayah</b>	<b>667,976,000</b>				<b>1,017,119,653</b>
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Riau	1 Dokumen	104,530,000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	70,000,000
3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Riau	330 Unit	563,446,000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Unit	400,000,000

3	25	03	1.01	0003	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Riau	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	400	547,119,653
3	25	03	102		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah wilayah perikanan tangkap diperaian umum daratan yang dimanfaatkan</b>		<b>4 Wilayah</b>	<b>412,891,580</b>			<b>455,331,401</b>
3	25	03	102	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Provinsi Riau	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	120,000,000
3	25	03	102	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Provinsi Riau	287 Unit	412,891,580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	350 Unit	335,331,401
3	25	03	103		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan</b>		<b>180 Izin</b>	<b>42,580,000</b>			<b>210,000,000</b>
3	25	03	103	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Provinsi Riau	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	110,000,000
3	25	03	103	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Provinsi Riau	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	100,000,000
3	25	03	103	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mi	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Provinsi Riau	100 Persentase	42,580,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		

					BIDANG BUDIDAYA			582,465,929				719,020,000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton), Ekor	Provinsi Riau	128,755.60	582,465,929			719,020,000
3	25	04	101		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	-			-
3	25	04	101	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Provinsi Riau	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
3	25	04	103		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang di terbitkan yang di terbitkan		-	-			-
3	25	04	103	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Provinsi Riau	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
3	25	04	104		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah		-	-			-

3	25	04	104	0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Riau	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
3	25	04	105		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan</b>		3 Kawasan	159,695,929			20,000,000
3	25	04	105	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	20,000,000
3	25	04	105	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	Provinsi Riau	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
3	25	04	105	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan ikan di laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Provinsi Riau	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
3	25	04	105	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Provinsi Riau	50 Orang	51,580,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
3	25	04	105	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Provinsi Riau	10 unit	108,115,929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		

3	25	04	106		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>	<b>Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan</b>		5 Kawasan	422,770,000				699,020,000
3	25	04	106	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	12 Unit	422,770,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35 Unit	594,020,000
3	25	04	106	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	105,000,000
					<b>Bidang P2HKP</b>				<b>195,000,000</b>				<b>67,000,000</b>
3	25	06			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Volume Produk hasil olahan perikanan (Ton)</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>17,306.21</b>	<b>195,000,000.00</b>				<b>67,000,000.00</b>
3	25	06	101		<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah izin usaha pemasaran dan pemrosesan hasil yang diterbitkan</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>6 izin</b>	<b>16,706,500.00</b>				<b>-</b>
3	25	06	101	0007	Penertiban rekomendasi perizinan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha subsektor pengolahan ikan dan subsektor pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Provinsi Riau	3 Rekomendasi	16,706,500.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
3	25	06	102		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>4 Unit</b>	<b>178,293,500</b>				<b>42,000,000</b>

3	25	06	102	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi Riau	2 Kegiatan	152,623,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
3	25	06	102	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Provinsi Riau	3 Kegiatan	25,670,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 Kegiatan	42,000,000
3	25	06	103		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Hasil Perikanan Yang Tersedia</b>		-	-			25,000,000
3	25	06	103	0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Riau	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
3	25	06	103	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan Insentif dan Fasilitasi	Provinsi Riau	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Unit Usaha	25,000,000

					BIDANG KP				50,000,000				110,000,000
						Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)		70					
3	25	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>5 Kasus</b>	<b>50,000,000</b>				<b>110,000,000</b>
3	25	05	1.01		<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi</b>		-	-				<b>50,000,000</b>
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Akti	Provinsi Riau	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Kelompok masyarakat	30,000,000
3	25	05	1	0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Provinsi Riau	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Forum	20,000,000
3	25	05	102		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan</b>		<b>16 Dokumen</b>	<b>50,000,000</b>				<b>60,000,000</b>
3	25	05	102	0001	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Provinsi Riau	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Pelaku Usaha	10,000,000

3	25	05	102	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Riau	4 Pelaku Usaha	13,120,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Pelaku Usaha	30,000,000
3	25	05	102	0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan Provinsi Kewenangannya	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Riau	10 Pelaku Usaha	36,880,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Pelaku Usaha	30,000,000
					<b>UPT.PSDKP WIL 1</b>				<b>192,769,080</b>			<b>377,630,000</b>
3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>121,300,017</b>			<b>197,630,000</b>
3	25	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi</b>		<b>6 Jenis</b>	<b>6,869,537</b>			<b>49,754,591</b>
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Indragiri Hilir	4 Paket	3,569,737	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 Paket	4,421,591
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Indragiri Hilir	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Paket	5,008,000
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Indragiri Hilir	2 Paket	239,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Paket	1,385,000

3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Indragiri Hilir	21 Laporan	3,060,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	38,940,000
3	25	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>2 Jenis</b>	<b>108,142,080</b>				<b>115,822,080</b>
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Indragiri Hilir	1 Laporan	108,142,080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	115,822,080
3	25	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>6,288,400</b>				<b>32,053,329</b>
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Indragiri Hilir	2 Unit	482,400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	10,802,000
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Indragiri Hilir	3 Unit	5,036,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	15,091,329
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Indragiri Hilir	3 Unit	770,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 Unit	6,160,000

3	25	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	Provinsi Riau	5 kasus	71,469,063				180,000,000
3	25	05	101		<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi</b>		80 pelaku usaha	71,469,063				180,000,000
3	25	5	101	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Pelaku Usaha	8,380,000
3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	20 Pelaku Usaha	63,089,063	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35 Pelaku Usaha	154,860,000
3	25	5	101	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	2 Pelaku Usaha	8,380,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Pelaku Usaha	16,760,000
					<b>UP.PSDKP WIL 2</b>				<b>354,524,120</b>				<b>451,610,759</b>
3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100%	252,033,120				248,832,180
3	25	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)</b>		6 Jenis	31,426,000				76,442,140

3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkalis	5 Paket	5,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Paket	31,858,140
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkalis	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	7,728,000
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Bengkalis	2 Paket	1,636,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	1,636,000
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	24,790,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	35,220,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>2 Jenis</b>	<b>158,290,176</b>				<b>118,235,040</b>
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkalis	6 Laporan	158,290,176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Laporan	118,235,040
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>3 Unit</b>	<b>62,316,944</b>				<b>54,155,000</b>
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Bengkalis	2 Unit	17,286,944	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	17,895,000
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Bengkalis	6 Unit	45,030,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Unit	36,260,000

3	25	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani		5 kasus	102,491,000				202,778,579
3	25	05	101		<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi		88 pelaku usaha	102,491,000				202,778,579
3	25	5	101	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Pelaku Usaha	11,740,000
3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kep.Meranti	60 Pelaku Usaha	72,221,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32 Pelaku Usaha	158,880,759
3	25	5	101	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	4 Pelaku Usaha	30,270,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Pelaku Usaha	32,157,820
					<b>UPT.PSDKP WIL 3</b>				<b>312,925,468.52</b>				<b>500,000,000</b>
3	25	01	1.02		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100%	136,100,469				214,960,000
3	25	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		6 Jenis	23,136,547				45,061,000
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Rokan Hilir	5 Paket	3,656,547	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Paket	8,995,000

3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Rokan Hilir	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Paket	5,400,000
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Rokan Hilir	1 Paket	500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Paket	2,031,000
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Rokan Hilir	1 Laporan	18,980,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	28,635,000
3	25	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>2 Jenis</b>	<b>4,707,600</b>			<b>21,000,000</b>
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Rokan Hilir	2 Unit	4,707,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8 Unit	21,000,000
3	25	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>79,145,088</b>			<b>99,655,248</b>
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Rokan Hilir	3 Laporan	79,145,088	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 Laporan	99,655,248
3	25	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>29,111,234</b>			<b>49,243,752</b>

3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Rokan Hilir	2 Unit	12,161,233.52	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Unit	11,249,312
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Rokan Hilir	2 Unit	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 Unit	33,000,000
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Rokan Hilir	9 Unit	1,950,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9 Unit	4,994,440
3	25	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)</b>		<b>5 kasus</b>	<b>176,825,000</b>			<b>285,040,000</b>
3	25	05	101		<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi</b>		<b>105 pelaku usaha</b>	<b>176,825,000</b>			<b>285,040,000</b>
3	25	5	101	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0 Pelaku Usaha	

3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai	28 Pelaku Usaha	176,825,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48 Pelaku Usaha	270,040,000
3	25	5	101	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan	2 Dokumen		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Pelaku Usaha	15,000,000
					<b>UPT.Budidaya Perikanan</b>				<b>1,859,596,614</b>				<b>2,085,083,366</b>
3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100 Persen</b>	<b>732,001,888</b>				<b>817,085,254</b>
3	25	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi</b>		<b>4 Jenis</b>	<b>67,400,000</b>				<b>116,528,366</b>
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	6 Paket	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 paket	26,386,366
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 paket	7,692,000
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pekanbaru	6 Paket	2,400,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 paket	4,450,000

3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	15 Laporan	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	78,000,000
3	25	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1 Jenis</b>	<b>532,781,568</b>				<b>532,781,568</b>
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	20 Laporan	532,781,568	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Laporan	532,781,568
3	25	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>131,820,320</b>				<b>167,775,320</b>
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pekanbaru	5 Unit	107,265,320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Unit	107,265,320
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pekanbaru	15 unit	24,555,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 unit	35,510,000

3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pekanbaru	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Unit	25,000,000
3	25	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)</b>		<b>128,755.60</b>	<b>1,127,594,726</b>			<b>1,267,998,112</b>
3	25	04	106		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>	<b>Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan</b>		<b>4 kawasan</b>	<b>1,127,594,726</b>			<b>1,267,998,112</b>
3	25	04	106	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pekanbaru	8 unit	1,127,594,726	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8 Unit	1,237,998,112
3	25	04	106	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pekanbaru, Bengkalis, dan Kampar	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Unit	30,000,000
					<b>UPT.PMHP</b>				<b>194,263,929</b>			<b>379,999,088</b>
3	25	01	1.02		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100 Persen</b>	<b>144,275,929</b>			<b>209,145,088</b>
3	25	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>6 Jenis</b>	<b>20,130,841</b>			<b>33,976,162</b>

3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	5 Paket	3,000,985	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	9,972,206
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Dumai	4 Paket	2,139,856	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Paket	2,139,858
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	1 Laporan	14,990,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	21,864,098
3	25	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		2 jenis	<b>79,145,088</b>				<b>79,145,088</b>
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	3 Laporan	79,145,088.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 laporan	79,145,088
3	25	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>45,000,000</b>				<b>96,023,838</b>
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Riau	3 Unit	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	21,023,838
3	25	1	1.10	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Dumai	2 Unit	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 unit	25,000,000

3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	20,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	50,000,000
3	25	06			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Volume Produk hasil olahan perikanan</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>17,306.21</b>	<b>49,988,000</b>				<b>170,854,000</b>
3	25	06	1.02		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan</b>		<b>4 unit</b>	<b>49,988,000</b>				<b>170,854,000</b>
3	25	06	102	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi Riau	3 Kegiatan	49,988,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Kegiatan	170,854,000
					<b>UPT.PELABUHAN PERIKANAN</b>		Kota Dumai		<b>702,904,908</b>				<b>1,018,899,429</b>
3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100 Persen</b>	<b>512,904,908</b>				<b>728,899,429</b>
3	25	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>6 Jenis</b>	<b>40,638,348</b>				<b>71,704,254</b>

3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	5 Paket	5,998,078	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Paket	15,403,289
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	5 Paket	1,600,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	3,200,000
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Dumai	5 Paket	4,990,270	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	8,790,965
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	1 Laporan	28,050,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	44,310,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>287,946,560</b>				<b>432,525,175</b>
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	11 Laporan	287,946,560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	432,525,175
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>184,320,000</b>				<b>224,670,000</b>
3	25	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Dumai	3 Unit	69,770,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	80,120,000

3	25	1	1.10	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Dumai	3 Unit	114,550,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	114,550,000
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Dumai	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	30,000,000
3	25	03			<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>		<b>128,100 Ton</b>	<b>190,000,000</b>				<b>290,000,000</b>
3	25	03	106		<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>1 Unit</b>	<b>190,000,000</b>				<b>290,000,000</b>
3	25	03	106	0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Kota Dumai	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	50,000,000
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Kota Dumai	1 Unit	190,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 unit	190,000,000
3	25	03	106	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Kota Dumai	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Layanan	50,000,000
									<b>41,070,353,980.00</b>				<b>40,365,468,211</b>

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah). Pagu anggaran Tahun 2026 sebesar Rp. 41.070.353.980,02,- dengan 6 program dan 21 kegiatan, 89 sub kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Capaian Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja ujuan,Sasaran ,Program, (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Pagu Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Perencanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											2025		2026		Target	Rp (Juta)		
											Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	5					6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat pelaku perikanan								NTN	104.54		105		106		106			
								NTPi	98.65		105		106		106			
							SEKRETARIAT						35,174,363,891.48					
		3	25	01	1.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen		100 Persen	29,554,767,595	100 Persen	35,174,363,891	100 Persen	64,729,131,486		
		3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		-	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	35,021,029	1 Laporan	185,021,029		
		3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	50,000,000	-	-	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru

		3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	19,999,760	1 Laporan	69,999,760	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
		3	25	02	1.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	15,021,269	1 Dokumen	65,021,269	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
		3	25	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	5 Laporan	<b>21,543,771,408</b>	5 Laporan	<b>24,079,971,151</b>	2 Laporan	<b>31,944,949,844</b>	5 Laporan	56,024,920,995		
		3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang	21,543,771,408	143 Orang	24,079,971,151	210 Orang/Bulan	31,944,949,844	210 Orang/Bulan	56,024,920,995	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
		3	25	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	1 Laporan	<b>80,925,000</b>	1 Laporan	<b>350,000,000</b>	1 Laporan	<b>49,785,000</b>	1 Laporan	<b>399,785,000</b>		
		3	25	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	200,000,000	-	-	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
		3	25	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi			14 Laporan	70,000,000	1 Laporan	49,785,000	14 Laporan	119,785,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru



							Konsultasi SKPD												
		3	25	02	1.07	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		11 Dokumen	30,000,000	-	-	11 Dokumen	30,000,000		Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru	
		3	25	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 Jenis	2 Jenis	<b>2,444,192,376</b>	2 Jenis	<b>3,147,549,151</b>	2 Jenis	<b>2,268,280,311</b>	2 Jenis	5,415,829,462		
		3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1,066,636,220	4 Laporan	1,769,992,995	4 Laporan	1,889,992,983	4 Laporan	3,659,985,978	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
		3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44 Laporan	44 Laporan	1,377,556,156	44 Laporan	1,377,556,156	44 Laporan	378,287,328	44 Laporan	1,755,843,484	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
		3	25	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	2 Jenis	2 Jenis	<b>135,925,877</b>	2 Jenis	<b>160,494,125</b>	-	-	2 Jenis	160,494,125		
		3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	13 Unit	14 Unit	135,925,877	14 Unit	135,494,125	-	-	48 Jenis	135,494,125	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru

							Lainnya yang Disediakan												
		3	25	02	1.08	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit	25,000,000	-	-	6 Unit	25,000,000		Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru	
		3	25	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	27 Jenis	<b>266,986,295</b>	27 Jenis	<b>419,986,295</b>	27 Jenis	<b>323,885,776</b>	108 Jenis	743,872,071			
		3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	167,166,295	27 Unit	167,166,295	27 Unit	277,445,776	107 Jenis	444,612,071	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru	
		3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			278 Unit	153,000,000	278 Unit	46,440,000	556 Unit	199,440,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru	
		3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99,820,000	1 Unit	99,820,000	-	-	1 Unit	99,820,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru	



		3	25	02	101	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana WP3K	0		50 Orang	100,000,000	-	-	100 orang	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
		3	25	02	101	0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1		1 Dokumen	146,323,864	-	-	2 Dokumen	146,323,864	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekabaru
		3	25	02	102		<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Jumlah Izin yang Diterbitkan</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>8 Izin</b>	<b>75,000,000</b>	<b>9 Izin</b>	<b>45,023,000</b>	17 Izin	120,023,000		
		3	25	02	102	0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	0		1 Rekomendasi	75,000,000	1 Dokumen	45,023,000	1 Rekomendasi	120,023,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
		3	25	02	103		<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	10 Kelompok	<b>300,000,000</b>	-	-	28 Kelompok	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau

		3	25	02	103	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	0		60 Orang	150,000,000	-	-	120 Orang	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
		3	25	02	103	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok Masyarakat yang mengikuti penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau - pulau kecil	0		2 Kelompok	150,000,000	-	-	4 Kelompok	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
							<b>BIDANG TANGKAP</b>											
								Jumlah Produksi Perikanan(Ton )	270,544.31		202,276.26	272,713	256,855.60	274,880	204,299.02	547,592		
	Meningkatnya Produksi Perikanan	3	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)	134,972.83	5,512,360,140	140,000.00	5,979,424,456	128,100.00	1,123,447,580	140,840.00	7,102,872,036		
		3	25	03	101		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan	3	3,858,179,915	3 Wilayah	3,441,111,170	2 Wilayah	667,976,000	3 Wilayah	4,109,087,170		
		3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut	0		1 Dokumen	180,000,000	1 Dokumen	104,530,000	1 Dokumen	284,530,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau

							sampai dengan 12 Mil												
		3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0		2 Unit	275,000,000	-	-	4 Unit	275,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau	
		3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2647	3,858,179,915	1522 Unit	2,986,111,170	330 Unit	563,446,000	3961 Unit	3,549,557,170	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau	
		3	25	03	102		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan</b>	-	1,654,180,225	4 Wilayah	2,170,000,000	1 Wilayah	412,891,580	4 Wilayah	2,582,891,580			
		3	25	03	102	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0		1 Dokumen	170,000,000	-	-	0	170,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau	
		3	25	03	102	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di	82	1,654,180,225	45 Unit	2,000,000,000	287 Unit	412,891,580	172 Unit	2,412,891,580	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau	



							sampai dengan 12 mil											
							<b>BIDANG BUDIDAYA</b>						<b>582,465,929</b>					
	Meningkatnya Produksi Perikanan	3	25	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton) , Ekor	121,485. 31		132,712. 51	5,089,505,105	128,755. 60	582,465,929	134,039.6 3	5,671,971,034	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
		3	25	04	101		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-		5 izin	20,000,000	-	-	5 izin	20,000,000		
		3	25	04	101	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko			1 Dokumen	20,000,000	-	-	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau

		3	25	04	103		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang di terbitkan	-	3 izin	20,000,000	-	-	3 izin	20,000,000		
		3	25	04	103	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan		1 Rekomendasi	20,000,000	-	-	2 Rekomendasi	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
		3	25	04	104		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah	3 Kawasan	3 Kawasan	70,000,000	-	-	3 Kawasan	70,000,000		

		3	25	04	104	0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100 Rekomendasi	70,000,000	-	-	200 Rekomendasi	70,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
		3	25	04	105		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan</b>		3,487,618,000	3 Kawasan	2,879,505,105	3 Kawasan	159,695,929	3 Kawasan	3,039,201,034		
		3	25	04	105	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	70,000,000	-	-	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
		3	25	04	105	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)		1,500,000,000	6 Unit	1,082,842,105	-	-	12 Unit	1,082,842,105	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
		3	25	04	105	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan ikan di laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4	1,845,609,000	12 Unit	1,500,000,000	-	-	28 Unit	1,500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
		3	25	04	105	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	-		90 Orang	125,000,000	50 Orang	51,580,000	180 Orang	176,580,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau

		3	25	04	105	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	0	142,009,000	10 Dokumen	101,663,000	10 unit	108,115,929	20 Dokumen	209,778,929	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
		3	25	04	106		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>	<b>Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan</b>	<b>5 Kawasan</b>		<b>5 Kawasan</b>	<b>2,100,000,000</b>	<b>4 Kawasan</b>	<b>422,770,000</b>	<b>5 Kawasan</b>	2,522,770,000		
		3	25	04	106	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			4 Unit	1,100,000,000	12 Unit	422,770,000	8 Unit	1,522,770,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
		3	25	04	106	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			3 Unit	<b>1,000,000,000</b>	-	-	6 Unit	1,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
							<b>Bidang P2HKP</b>							<b>195,000,000</b>				
	<b>Meningkatnya Produksi Perikanan</b>	3	25	06			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Volume Produk hasil olahan perikanan (Ton)</b>	<b>16,312.77</b>		<b>29,845.28</b>	<b>773,000,000.00</b>	<b>17,306.21</b>	<b>195,000,000.00</b>	<b>31,662.85</b>	<b>968,000,000</b>	<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Provinsi Riau</b>







							BIDANG KP								50,000,000			
								Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)	89.91		90		70		91	-		
	Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani (kasus)	20		7 kasus	1,000,000,000	5 Kasus	50,000,000	12 kasus	1,050,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
		3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	160 Pelaku Usaha	-	245 Pelaku Usaha	600,000,000	-	-	270 Pelaku Usaha	600,000,000		
		3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Akti	110		2 Kelompok Masyarakat	560,000,000	-	-	114 kelompok masyarakat	560,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau

		3	25	05	1.02	0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan			2 Forum	40,000,000	-	-		40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
		3	25	05	102		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan	0	-	40 Dokumen	<b>400,000,000</b>	16 Dokumen	<b>50,000,000</b>	80 Dokumen	450,000,000		
		3	25	05	102	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0		10 Dokumen	100,000,000	4 Pelaku Usaha	13,120,000	20 Dokumen	113,120,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau

		3	25	05	102	0006	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0		10 Dokumen	200,000,000	10 Pelaku Usaha	36,880,000	20 Dokumen	236,880,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
		3	25	05	102	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	22		20 Dokumen	100,000,000	-	-	62 Dokumen	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau



		3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	107,376,720	4 Laporan	106,170,240	1 Laporan	108,142,080	4 Laporan	214,312,320	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir
		3	25	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	3 Jenis	<b>53,947,900</b>	3 Jenis	<b>83,947,320</b>	3 Jenis	<b>6,288,400</b>	12 Jenis	90,235,720		
		3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	23,947,900	2 Unit	23,947,320	2 Unit	482,400	8 Unit	24,429,720	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir
		3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	30,000,000	3 Unit	50,000,000	3 Unit	5,036,000	1 Unit	55,036,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir
		3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		16 Unit	10,000,000	3 Unit	770,000	48 Unit	10,770,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir

	Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan	3	25	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus)	<u>20</u>	-	7.00	<b>380,650,483</b>	5.00	<b>71,469,063</b>	7.00	452,119,546	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
		3	25	05	101		<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi</b>	50	-	80	<b>380,650,483</b>	80	<b>71,469,063</b>	160	452,119,546		
		3	25	5	101	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	0	-	5 Dokumen	30,650,483	-	-	12 Dokume	30,650,483	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan
		3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0		7 Dokumen	320,000,000	80 Pelaku Usaha	63,089,063	12 Dokumen	383,089,063	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan

		3	25	5	101	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0		2 Dokumen	30,000,000	2 Pelaku Usaha	8,380,000	4 Dokumen	38,380,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan
							<b>UP.PSDKP WIL 2</b>					<b>728,074,196</b>		<b>354,524,120</b>		<b>1,082,598,316</b>		
		3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%		100%	<b>302,778,528</b>	100%	<b>252,033,120</b>	100%	554,811,648		
		3	25	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	6 Jenis	<b>116,188,960</b>	6 Jenis	<b>116,165,896</b>	6 Jenis	<b>31,426,000</b>	6 Jenis	147,591,896		
		3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	70,641,204	6 Paket	70,618,140	5 Paket	5,000,000	24 Paket	75,618,140	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkalis
		3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	7,728,000	5 Paket	7,728,000	-	-	20 Paket	7,728,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkalis
		3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	2,599,756	2 Paket	2,599,756	2 Paket	1,636,000	8 Paket	4,235,756	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkalis

		3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	35,220,000	12 Laporan	35,220,000	1 Laporan	24,790,000	46 Laporan	60,010,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkalis
		3	25	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 Jenis	<b>119,682,816</b>	2 Jenis	<b>118,717,632</b>	2 Jenis	<b>158,290,176</b>	2 Jenis	277,007,808		
		3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	119,682,816	5 Laporan	118,717,632	6 Laporan	158,290,176	5 Laporan	277,007,808	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkalis
		3	25	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	3	<b>17,895,000</b>	3 Unit	<b>67,895,000</b>	3 Unit	<b>62,316,944</b>	3 Unit	130,211,944		
		3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	17,895,000	2 Unit	17,895,000	2 Unit	17,286,944	2 Unit	35,181,944	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkalis

		3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0		3 unit	50,000,000	6 Unit	45,030,000	3 Unit	95,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkulu
	<b>Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan</b>	3	25	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani	3		7.00	<b>425,295,668</b>	5 kasus	<b>102,491,000</b>	5.00	527,786,668		
		3	25	05	101		<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>		50	-	80	<b>425,295,668</b>	88 pelaku usaha	<b>102,491,000</b>	221	527,786,668		
		3	25	5	101	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil			5 Dokumen	30,000,000	-	-	12 Dokumen	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkulu, Siak dan Kep.Me ranti
		3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			7 Dokumen	365,295,668	60 Pelaku Usaha	72,221,000	12 Dokumen	437,516,668	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Bengkulu, Siak dan Kep.Me ranti

							Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0		2 Dokumen	30,000,000	4 Pelaku Usaha	30,270,000	4 Dokumen	60,270,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan
							<b>UPT.PSDKP WIL 3</b>					<b>915,245,609</b>		<b>312,925,468.52</b>		<b>1,228,171,078</b>		
		3	25	01	1.02		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%		100%	<b>385,245,609</b>	100%	<b>136,100,469</b>	100%	521,346,078		
		3	25	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	6 Jenis	<b>58,968,992</b>	6 Jenis	<b>58,751,896</b>	6 Jenis	<b>23,136,547</b>	6 Jenis	81,888,443		
		3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27	20,358,912	6 Paket	20,357,774	5 Paket	3,656,547	24 Paket	24,014,321	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir
		3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	7,728,000	5 Paket	7,728,000	-	-	20 Paket	7,728,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir
		3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2,032,080	5 Paket	2,031,122	1 Paket	500,000	20 Paket	2,531,122	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir

		3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	28,850,000	10 Laporan	28,635,000	1 Laporan	18,980,000	40 Laporan	47,615,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir
		3	25	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	2 Jenis	<b>58,375,401</b>	2 Jenis	<b>58,374,433</b>	2 Jenis	<b>4,707,600</b>	2 Jenis	63,082,033		
		3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	58,375,401	8 Unit	58,374,433	2 Unit	4,707,600	32 Unit	63,082,033	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir
		3	25	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	3 Jenis	<b>176,869,968</b>	3 Jenis	<b>176,869,968</b>	3 Jenis	<b>79,145,088</b>		256,015,056		
		3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	176,869,968	7 Laporan	176,869,968	3 Laporan	79,145,088	7 Laporan	256,015,056	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir
		3	25	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	3 Jenis	<b>11,250,000</b>	3 Jenis	<b>91,249,312</b>	3 Jenis	<b>29,111,234</b>	3 Jenis	120,360,546		

							daerah yang dipelihara											
		3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	11,250,000	2 Unit	11,249,312	2 Unit	12,161,234	2 Unit	23,410,546	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir
		3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0		3 Unit	75,000,000	2 Unit	15,000,000	3Unit	90,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir
		3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		9 Unit	5,000,000	9 Unit	1,950,000	9 Unit	6,950,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir
	Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan	3	25	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani (kasus)	20		7.00	530,000,000	5 kasus	176,825,000	89.48	706,825,000		
		3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi	50	-	85	530,000,000	105 pelaku usaha	176,825,000	#VALUE!	706,825,000		

		3	25	5	101	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil			5 Dokumen	30,000,000	-	-	12 Dokumen	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai					
		3	25	5	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			7 Dokumen	470,000,000	28 Pelaku Usaha	176,825,000	12 Dokumen	646,825,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai					
		3	25	5	101	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	0		2 Dokumen	30,000,000	-	-	4 Dokumen	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan					
							<b>UPT. Budidaya Perikanan</b>					<b>3,889,465,030</b>				<b>5,379,690,419</b>		<b>1,859,596,614</b>		<b>7,239,287,033</b>			
		3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100 Persen		100 Persen	<b>726,628,977</b>	100 Persen	<b>1,224,864,172</b>	100 Persen	<b>732,001,888</b>	100 Persen				<b>1,956,866,060</b>		

		3	25	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	4 Jenis	<b>121,098,189</b>	4 Jenis	<b>145,098,189</b>	4 Jenis	<b>67,400,000</b>	4 Jenis	212,498,189		
		3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	42,710,794	6 Paket	42,710,794	6 Paket	15,000,000	24 Paket	57,710,794	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
		3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	8,387,395	6 Paket	12,387,395	-	-	20 Paket	12,387,395	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
		3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5,000,000	6 Paket	12,000,000	6 Paket	2,400,000	16 Paket	14,400,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
		3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	65,000,000	28 Laporan	78,000,000	15 Laporan	50,000,000	93 Laporan	128,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
		3	25	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1 Jenis	<b>495,380,688</b>	1 Jenis	<b>702,490,663</b>	1 Jenis	<b>532,781,568</b>	1 Jenis	1,235,272,231		
		3	25	01	1.08	'0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	495,380,688	18 Laporan	702,490,663	20 Laporan	532,781,568	18 Laporan	1,235,272,231	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru

		3	25	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	3 Jenis	<b>110,150,100</b>	3 Jenis	<b>377,275,320</b>	3 Jenis	<b>131,820,320</b>	3 Jenis	509,095,640		
		3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	42,150,100	5 Unit	102,275,320	5 Unit	107,265,320	20 Unit	209,540,640	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
		3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0		15	75,000,000	15	24,555,000	4 Unit	99,555,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
		3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	68,000,000	37 Unit	200,000,000	-	-	108 Unit	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru
	<b>Meningkatnya Produksi Perikanan</b>	3	25	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)</b>	<b>121,485.31</b>	<b>3,162,836,053</b>	<b>132,712.51</b>	<b>4,154,826,247</b>	<b>128,755.60</b>	<b>1,127,594,726</b>	<b>134,039.63</b>	<b>5,282,420,973</b>		
		3	25	04	106		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>	<b>Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan</b>	<b>5 Kawasan</b>	<b>3,162,836,053</b>	<b>5 Kawasan</b>	<b>4,154,826,247</b>	<b>4 Kawasan</b>	<b>1,127,594,726</b>	<b>152.500.00 Ekor</b>	<b>5,282,420,973</b>		

								<b>darat yang dimanfaatkan</b>										
		3	25	04	106	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	841,113,195	8 unit	1,848,476,247	8 Unit	1,127,594,726	6 Unit	2,976,070,973	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru	
		3	25	04	106	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2,321,722,858	3 Unit	2,306,350,000	-	-	6 Unit	2,306,350,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekanbaru, Bengkalis, dan Kampar	

							UPT.PMHP		299,846,472		644,108,416		194,263,929		838,372,345			
		3	25	01	1.02		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100 Persen	<b>299,846,472</b>	100 Persen	<b>394,108,416</b>	100 Persen	<b>144,275,929</b>	100 Persen	538,384,345		
		3	25	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	6 Jenis	<b>28,672,064</b>	6 Jenis	<b>28,672,064</b>	6 Jenis	<b>20,130,841</b>	6 Jenis	48,802,905		
		3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	9,972,206	5 Paket	9,972,206	5 Paket	3,000,985	15 Paket	12,973,191	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
		3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2,139,858	4 Paket	2,139,858	4 Paket	2,139,856	12 Paket	4,279,714	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
		3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	16,560,000	4 Laporan	16,560,000	1 Laporan	14,990,000	12 Laporan	31,550,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
		3	25	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 jenis	<b>250,150,570</b>	2 jenis	<b>289,412,514</b>	2 jenis	<b>79,145,088</b>	2 jenis	368,557,602		

		3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	250,150,570	10 Laporan	289,412,514.42	3 Laporan	79,145,088.00	10 Laporan	368,557,602	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
		3	25	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	3 Jenis	<b>21,023,838</b>	3 Jenis	<b>76,023,838</b>	3 Jenis	<b>45,000,000</b>	<b>12 unit</b>	121,023,838		
		3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	21,023,838	3 Unit	21,023,838	3 Unit	15,000,000	<b>12 unit</b>	36,023,838	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
		3	25	1	1.10	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit		3 Unit	50,000,000	2 Unit	10,000,000	3 Unit	60,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
		3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		9 Unit	5,000,000	1 Unit	20,000,000	18 Unit	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	<b>Meningkatnya Produksi Perikanan</b>	3	25	06			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Volume Produk hasil olahan perikanan	16,312.77	-	29,845.28	<b>250,000,000</b>	17,306.21	<b>49,988,000</b>	31,662.85	299,988,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau

		3	25	06	1.02		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan</b>		-	5 Dokumen	<b>250,000,000</b>	4 unit	<b>49,988,000</b>		299,988,000		
		3	25	06	102	0002	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1		10 Sampel	<b>250,000,000</b>	3 kegiatan	49,988,000	15 Sampel	299,988,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Riau
							<b>UPT.PELABUHAN PERIKANAN</b>			<b>3,478,881,102</b>		<b>17,097,367,615</b>		<b>702,904,908</b>		17,800,272,523	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
		3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100 Persen	<b>426,794,456</b>	100 Persen	<b>736,968,884</b>	100 Persen	<b>512,904,908</b>	100 Persen	1,249,873,792		

		3	25	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	6 Jenis	<b>62,953,215</b>	6 Jenis	<b>125,696,784</b>	6 Jenis	<b>40,638,348</b>	6 Jenis	166,335,132		
		3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15,625,215	5 Paket	14,966,401	5 Paket	5,998,078	20 Paket	20,964,479	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
		3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13	9,348,000	5 Paket	4,771,943	5 Paket	1,600,000	20 Paket	6,371,943	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
		3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3,000,000	5 Paket	9,868,440	5 Paket	4,990,270	20 Paket	14,858,710	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
		3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18	34,980,000	30 Laporan	96,090,000	1 Laporan	28,050,000	108 Laporan	124,140,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
		3	25	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	3 Jenis	<b>316,741,216</b>	3 Jenis	<b>384,867,120</b>	3 Jenis	<b>287,946,560</b>	3 Jenis	672,813,680		
		3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	316,741,216	11 Laporan	384,867,120	11 Laporan	287,946,560	11 Laporan	672,813,680	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai

		3	25	1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	3 Jenis	<b>47,100,025</b>	3 Jenis	<b>226,404,980</b>	3 Jenis	<b>184,320,000</b>	410,724,980			
		3	25	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	47,100,025	3 Unit	70,404,980	3 Unit	69,770,000	3 Unit	140,174,980	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
		3	25	1	1.10	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit		3 Unit	150,000,000	3 Unit	114,550,000	3 Unit	264,550,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
		3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		14 Unit	6,000,000	-	-	14 Unit	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai
	<b>Meningkatnya Produksi Perikanan</b>	3	25	03			<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>	147,176.78	<b>3,052,086,646</b>	<b>140,000</b>	<b>16,360,398,731</b>	<b>128,100.00</b>	<b>190,000,000</b>	<b>140,840.00</b>	16,550,398,731		
		3	25	03	106		<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola	1	<b>3,052,086,646</b>	1 Unit	<b>16,360,398,731</b>	1 Unit	<b>190,000,000</b>	2 Unit	16,550,398,731	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai

		3	25	03	106	0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		1 Unit	500,000,000	-	-	2 Unit	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai				
		3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2	3,052,086,646	1 Unit	15,715,227,000	1 Unit	190,000,000	6 Unit	15,905,227,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai			
		3	25	03	106	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	0		1 Layanan	145,171,731	-	-	1 Layanan	145,171,731	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Dumai			
											<b>45,472,473,261</b>				<b>69,358,934,480</b>		<b>41,070,353,980.00</b>		<b>110,429,288,460</b>		

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara Kelembagaan dalam pelaksanaan Program kegiatan pada Tahun 2026, urusan pemerintah bidang kelautan.

Dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, masih dijumpai permasalahan/kendala baik eksternal maupun internal yang harus dicarikan solusinya. Beberapa permasalahan strategis tersebut antara lain terkait dengan manajemen perencanaan kinerja yang masih ditemui sepanjang tahun 2024 yaitu: (1) masih terjadi perubahan indikator dokumen Renstra, sehingga dokumen kinerja yang disusun tidak konsisten; (2) Masih terdapat inkonsistensi dalam dokumen Rencana Kerja, dan penyusunan RKA pada angka pencapaian target kinerja dari indikator kinerja yang ditetapkan.

Dengan masih besarnya Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal maka dengan adanya dokumen Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau untuk Tahun 2026, dapat memberi acuan kerja dalam mendukung program pemerintah daerah maupun pusat dalam melaksanakan program kegiatan kedepan, meningkatkan kinerja aparatur, sasaran dan target yang akan dicapai serta mengevaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Riau tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadikan komitmen bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai pemegang amanah dan stakeholder untuk bersama-sama menciptakan *good governance* dalam mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan

Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 berpengaruh oleh APBD maka program dan kegiatan akan di prioritaskan untuk berkaitan langsung kepada masyarakat untuk memenuhi misi yang di dukung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Demikianlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ini di buat untuk mejadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan kedepan.

Pekanbaru, November 2025

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Riau



Wiwik Puji Rahayu, S.Pi, M.Si  
Pembina TK.I / IV.b  
NIP. 19700508 199703 2 004



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Pattimura No. 6 Telp. (0761) 22921 – 34685, Fax. (0761) 23191

PEKANBARU – 28131

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

NOMOR : 000.7.2/DKP-Sekr/2025/I/001.4

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026  
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 125 sampai dengan Pasal 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;

15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2026 Dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. Melakukan Pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya;
- b. Melakukan koordinasi dan penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan Dokumen Kebijakan Lainnya.
- c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya;
- d. Menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2026 Dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025;
- e. Melakukan analisis dan pengkajian hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya, untuk penentuan isu-isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
- d. Perumusan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai target kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan RKPD;
- f. Terlibat secara penuh dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2026 Dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Provinsi Riau.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pekanbaru  
pada tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI RIAU



H. YURNALIS, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya/IVd  
NIP. 19710417 200212 1 006

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

Nomor : 000.7.2/DKP-Sekr/2025/I/001.4

Tanggal : 03 Januari 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU  
TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN  
DAN PERIKANAN PROVINSIN RIAU TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL</b>
1.	Ketua Tim	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Sekretaris Tim	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
3.	Sekretariat	
	- Koordinator	Perencana Ahli Muda
	- Anggota 2	Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
	- Anggota 3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
4.	Kelompok Kerja Bidang Perikanan Budidaya	
	- Koordinator	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
	- Anggota 1	Analisis Akuakultur Ahli Muda
	- Anggota 2	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda
5.	Kelompok Kerja Bidang Perikanan Tangkap	
	- Koordinator	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
	- Anggota 1	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
6.	Kelompok Kerja Bidang P2HKP	
	- Koordinator	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
	- Anggota 1	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda
	- Anggota 2	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda
7.	Kelompok Kerja Bidang Kelautan dan Pengawasan	
	- Koordinator	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda

*Lanjutan Lampiran..*

	- Anggota 1	Pengawas Perikanan Ahli Muda
	- Anggota 2	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda
8.	Kelompok Kerja UPT. Pelabuhan Perikanan	
	- Koordinator	Kepala UPT. Pelabuhan Perikanan
	- Anggota 1	Kepala Subbagian Tata Usaha
	- Anggota 2	Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
	- Anggota 3	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan
9.	Kelompok Kerja UPT. Budidaya Perikanan	
	- Koordinator	Kepala UPT Budidaya Perikanan
	- Anggota 1	Kepala Subbagian Tata Usaha
	- Anggota 2	Kepala Seksi Teknis Pembenihan
	- Anggota 3	Kepala Seksi Teknis Pembudidayaan Perikanan
10.	Kelompok Kerja UPT. PMHP	
	- Koordinator	Kepala UPT PMHP
	- Anggota 1	Kepala Subbagian Tata Usaha
	- Anggota 2	Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan
	- Anggota 3	Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan
11.	Kelompok Kerja UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah I	
	- Koordinator	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah I
	- Anggota 1	Kepala Subbagian Tata usaha
	- Anggota 2	Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan
	- Anggota 3	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
12.	Kelompok Kerja UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah II	
	- Koordinator	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah II
	- Anggota 1	Kepala Subbagian Tata Usaha

*Lanjutan Lampiran..*

	- Anggota 1	Pengawas Perikanan Ahli Muda
	- Anggota 2	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda
8.	Kelompok Kerja UPT. Pelabuhan Perikanan	
	- Koordinator	Kepala UPT. Pelabuhan Perikanan
	- Anggota 1	Kepala Subbagian Tata Usaha
	- Anggota 2	Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
	- Anggota 3	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan
9.	Kelompok Kerja UPT. Budidaya Perikanan	
	- Koordinator	Kepala UPT Budidaya Perikanan
	- Anggota 1	Kepala Subbagian Tata Usaha
	- Anggota 2	Kepala Seksi Teknis Pembenihan
	- Anggota 3	Kepala Seksi Teknis Pembudidayaan Perikanan
10.	Kelompok Kerja UPT. PMHP	
	- Koordinator	Kepala UPT PMHP
	- Anggota 1	Kepala Subbagian Tata Usaha
	- Anggota 2	Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan
	- Anggota 3	Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan
11.	Kelompok Kerja UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah I	
	- Koordinator	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah I
	- Anggota 1	Kepala Subbagian Tata usaha
	- Anggota 2	Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan
	- Anggota 3	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
12.	Kelompok Kerja UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah II	
	- Koordinator	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah II
	- Anggota 1	Kepala Subbagian Tata Usaha

Lanjutan Lampiran...

	- Anggota 2	Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan
	- Anggota 3	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
13.	Kelompok Kerja UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III	
	- Koordinator	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III
	- Anggota 1	Kepala Subbagian Tata Usaha
	- Anggota 2	Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan
	- Anggota 3	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Ditetapkan di : Pekanbaru  
pada tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI RIAU



H. YURNALIS, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya/IVd  
NIP. 19710417 200212 1 006

**FORMULIR E-29**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN**  
**RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**PROVINSI RIAU**

NO	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah Provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah Provinsi	v			
2.	Pengolahan Data dan Informasi	v			
3.	Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	v			
4.	Mengkaji Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Lalu Berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah Provinsi	v			
5.	Penentuan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Riau	v			
6.	Penelaahan Rancangan Awal RKPD Provinsi	v			
7.	Perumusan Tujuan dan Sasaran	v			
8.	Penelaahan Usulan Masyarakat	v			
9.	Perumusan Kegiatan Prioritas	v			
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi	v			
10.a	Menyelaraskan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Dengan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota	v			
10.b	Mempertajam Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi	v			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	v			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	v			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	v			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	v			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	v			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah disahkan.	v			

Pekanbaru, November 2025  
 Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
 Provinsi Riau



Wiwik Puji Rahayu, S.Pi, M.Si  
 Pembina TK.I / IV.b  
 NIP: 19700508 199703 2 004





NO	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2025-2026 (diambil dari renstra)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025 (PERGESERAN)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD		TINGKAT CAPAIAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD		TINGKAT CAPAIAN		UNIT PEKERJAAN DAERAH						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.				
											K	Rp.	K	Rp.												K	Rp.	K	Rp.
											PREDIKAT KINERJA PROGRAM				Sangat Rendah		Sangat Rendah												
6	UPT PSDKP WILAYAH I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						100	Persentase	238.788.971																		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah						3	Jenis	22.715.591																		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	46.169.800	12	Paket	100.938.584	9	Paket	4.421.591,00	-	-	8	4.401.000	8	4.401.000	88,89	99,53	20	105.339.584	166,67	228,16	UPT.PSDKP Wilayah I		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	20.080.000	20	Paket	36.562.000	2	Paket	1.334.000,00	-	-	10	1.334.000	10	1.334.000	500,00	100,00	30	37.896.000	150,00	188,73	UPT.PSDKP Wilayah I		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	3.472.398	20	Paket	6.639.412	-	Paket	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6.639.412	100,00	191,21	UPT.PSDKP Wilayah I			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77	Laporan	112.920.000	77	Laporan	232.560.000	6	Laporan	16.960.000,00	-	-	10	11.510.000	10	11.510.000	166,67	67,87	87	244.070.000	112,99	216,14	UPT.PSDKP Wilayah I		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2	Jenis	170.616.380																		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	212.340.480	4	Laporan	427.093.920	7	Laporan	170.616.380	2	25.939.320	2	69.573.680	4	95.513.000	57,14	55,98	8	522.606.920	200,00	246,12	UPT.PSDKP Wilayah I		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah						2	Jenis	6.207.000																		
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	Unit	47.894.640	8	Unit	108.971.482	2	Unit	4.377.000,00	-	-	1	3.350.192	1	3.350.192	50,00	76,54	9	112.321.674	112,50	234,52	UPT.PSDKP Wilayah I		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	Unit	20.000.000	48	Unit	24.590.000	3	Unit	1.830.000,00	-	-	2	1.450.000	2	1.450.000	66,67	79,23	50	26.040.000	104,17	130,20	UPT.PSDKP Wilayah I		
											Rata-rata Capaian Kinerja(%)				132,77	68,45													
											Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sedang													
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)				74,72	45,85													
											PREDIKAT KINERJA PROGRAM				Sedang	Sangat Rendah													
7	UPT PSDKP WILAYAH II		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						100	Persentase	189.390.780																		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah						1	Jenis	9.639.400																		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Paket	141.236.280	24	Paket	316.377.668	5	Paket	9.639.400	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	24	316.377.668	100,00	224,01	UPT.PSDKP Wilayah II		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	15.456.000	20	Paket	30.720.000	-	Paket	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	20	30.720.000	100,00	198,76	UPT.PSDKP Wilayah II			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	5.199.512	8	Paket	11.215.214	-	Paket	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	8	11.215.214	100,00	215,70	UPT.PSDKP Wilayah II			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46	Laporan	70.440.000	46	Laporan	133.350.000	-	Laporan	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	46	133.350.000	100,00	189,31	UPT.PSDKP Wilayah II			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2	Jenis	179.751.380																		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	237.435.264	5	Laporan	475.835.712	5	Laporan	179.751.380	1	34.786.840	1	66.557.480	2	101.344.320	40,00	56,38	7	577.180.032	140,00	243,09	UPT.PSDKP Wilayah II		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah						-	Jenis	-																		
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	Unit	35.790.000	2	Unit	72.476.960	-	Unit	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	2	72.476.960	100,00	202,51	UPT.PSDKP Wilayah II			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	100.000.000	-	-	-	-	Unit	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	-	UPT.PSDKP Wilayah II		
											Rata-rata Capaian Kinerja(%)				5,71	0,00													
											Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah													
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)				2,86	0,00													
											PREDIKAT KINERJA PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah													
8	UPT PSDKP WILAYAH III		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						100	Persentase	231.967.160																		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah						6	Jenis	7.422.160																		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Jenis	40.715.548	6	Jenis	92.406.446	3	Paket	7.422.160	-	-	2	7.402.000	2	7.402.000	66,67	99,73	8	99.808.446	33,33	245,14	UPT.PSDKP Wilayah III		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	15.456.000	24	Paket	23.184.000	-	Paket	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	24	23.184.000	120,00	150,00	UPT.PSDKP Wilayah III			



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2025-2026 (diambil dari renstra)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025 (PERGESERAN)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD		TINGKAT CAPAIAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD		TINGKAT CAPAIAN		UNIT PERANGKAT DAERAH			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.												K
													Predikat Kinerja				Rendah		Sangat Tinggi							
													RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)				64,81		278,18							
													Predikat Kinerja PROGRAM				Rendah		Sangat Tinggi							
10	UPT PELABUHAN PERIKANAN								1.813.231.620																	
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>							100	Persn	640.059.990		70.579.080		353.229.100										
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							6	Jenis	55.861.390														
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	29.932.802	20	Paket	50.524.418	6	Paket	14.270.290	-	-	2	14.185.400	2	14.185.400	33,33	99,41	22	64.709.818	110,00	216,18	UPT.Pelabuhan Perikanan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	9.543.886	20	Paket	23.663.829	1	Paket	4.400.000	-	-	1	4.318.242	1	4.318.242	100,00	98,14	21	27.982.071	105,00	293,19	UPT.Pelabuhan Perikanan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	19.736.880	20	Paket	24.605.320	1	Paket	7.211.100	-	-	1	6.524.000	1	6.524.000	100,00	90,47	21	31.129.320	105,00	157,72	UPT.Pelabuhan Perikanan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108	Laporan	192.180.000	108	Laporan	263.250.000	1	Laporan	29.980.000	-	-	1	29.734.500	1	29.734.500	100,00	99,18	109	292.984.500	100,93	152,46	UPT.Pelabuhan Perikanan
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							3	Jenis	398.296.100														
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11	Laporan	769.734.240	11	Laporan	1.403.055.808	1	Laporan	398.296.100	4	70.579.080	4	144.777.600	8	215.356.680	800,00	54,07	19	1.618.412.488	172,73	210,26	UPT.Pelabuhan Perikanan
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							3	Jenis	185.902.500														
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	Unit	119.786.122	3	Unit	166.886.147	3	Unit	72.152.500	-	-		71.015.303	0	71.015.303	0,00	98,42	3	237.901.450	100,00	198,61	UPT.Pelabuhan Perikanan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						5	Unit	113.750.000	-	-		82.674.055	0	82.674.055	0,00	72,68	0,00	82.674.055	0,00	0,00	UPT.Pelabuhan Perikanan	
													Rata-rata Capaian Kinerja(%)				161,90		87,48							
													Predikat Kinerja				Sangat Tinggi									
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>							140.000	Ton	1.173.171.630														
			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola						1	Unit	1.173.171.630														
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	6	unit	31.430.454.000	6	unit	9.167.011.454	1	Unit	1.173.171.630	-	-					0,00	0,00	6	9.167.011.454	100,00	29,17	UPT.Pelabuhan Perikanan
													Rata-rata Capaian Kinerja(%)				0,00		0,00							
													Predikat Kinerja				Sangat Rendah		Sangat Rendah							
													RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)				80,95		43,74							
													Predikat Kinerja PROGRAM				Tinggi		Sangat Rendah							
11	UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)								238.617.424																	
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>							100	Persn	231.565.424		53.480.868		93.707.996										
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							6	Jenis	8.603.416														
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket	19.944.412	15	Paket	29.916.618	4	Paket	3.393.416	1	461.200		790.000	1	1.251.200	25,00	36,87	16	31.167.818	106,67	156,27	UPT.PMHP
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	4.278.716	12	Paket	6.419.574	1	Paket	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00	12	6.419.574	100,00	150,00	UPT.PMHP	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	33.120.000	12	Laporan	49.680.000	1	Laporan	5.210.000	1	3.862.500		1.302.500	1	5.165.000	100,00	99,14	13	54.845.000	108,33	165,59	UPT.PMHP
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							2	Jenis	209.646.008														
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	Laporan	579.152.925	10	Laporan	1.089.420.583	9	Laporan	209.646.008	3	44.157.168		86.102.456	3	130.259.624	33,33	62,13	13	1.219.680.207	130,00	210,60	UPT.PMHP
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							3	Jenis	13.316.000														
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	Unit	42.047.676	12	Unit	63.071.514	3	Unit	10.466.000	1	2.150.000		5.513.000	1	7.663.000	33,33	73,22	13	70.734.514	108,33	168,22	UPT.PMHP
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						1	Unit	2.850.000	1	2.850.000			1	2.850.000	100,00	100,00	0,00	2.850.000	0,00	0,00	UPT.PMHP	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Unit	10.000.000					Unit	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	UPT.PMHP	
													Predikat Kinerja				Sangat Rendah		Sangat Rendah							
			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>							29845,28	Ton	7.052.000		2.552.000		3.000.000										
			<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>							4	Unit	7.052.000														
			Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	15	Kegiatan	538.510.130	36	Unit	1.096.316.966	3	Kegiatan	7.052.000	3	2.552.000		3.000.000	3	5.552.000	100,00	78,73	39	1.101.868.966	260,00	204,61	UPT.PMHP
													Rata-rata Capaian Kinerja(%)				100,00		78,73							
													Predikat Kinerja				Sangat Tinggi		Tinggi							
													RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)				70,83		65,89							
													Predikat Kinerja PROGRAM				Sedang		Rendah							
													RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU (%)				44,51		64,68							
													Predikat Kinerja PROGRAM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				Sangat Rendah		Sangat Rendah							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD Berikutnya: